**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Konteks Penelitian**

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh perkembangan dunia pendidikan, dimana dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan arah maju mundurnya kualitas pendidikan. Hal ini bisa dirasakan ketika sebuah lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar bagus, maka akan memperlihatkan kualitas yang baik, berbeda dengan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan hanya dengan sekedarnya maka hasilnya pun biasa-biasa saja. Selanjutnya dengan adanya perubahan sistem pendidikan nasional, yaitu undang-undang No. 2 Tahun 1989 menjadi undang-undang No. 20 Tahun 2003, merupakan upaya pembaharuan pendidikan kearah peningkatan mutu. Upaya peningkatan mutu beralih menjadi tanggung jawab sekolah dengan diberlakukannya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang sejalan dengan era otonomi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin meningkatkan tuntutan kebutuhan sosial masyarakat. Pada akhirnya tuntutan tersebut bermuara kepada pendidikan, karena masyarakat meyakini bahwa pendidikan mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai tuntutan tersebut. Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah sebagai institusi tempat masyarakat berharap akan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pendidikan perlu perubahan yang dapat dilakukan melalui perubahan dan peningkatan pengelolaan atau manajemen pendidikan di sekolah.

 1

Chapman (1990) dalam Fattah (2003 : 28) menjelaskan bahwa :

**“**Manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk meningkatkan, me-redisain pengelolaan sekolah, bertujuan untuk memberikan kekuasaan dan meningkatkan partisipasi sekolah dalam upaya perbaikan kinerjanya yang mencakup guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat. Manajemen Berbasis Sekolah memodifikasi struktur pemerintahan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan pemerintahan dan manajemen kesetiap yang berkepentingan di tingkat lokal (*local stakeholders)***”.**

Dengan mengalihkan wewenang dalam keputusan dari pemerintah tingkat Pusat/Kanwil/Kadis ke tingkat sekolah, diharapkan sekolah akan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntunan lingkungan masyarakatnya. Pada pelaksanaannya disadari bahwa mengimplementasikan pemberian kewenangan kepada sekolah melalui pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memerlukan proses dan waktu. Organisasi berwajah lokal dalam kegiatannya cenderung berdasarkan pada konsensus lewat dialog dan diskusi yang terbuka dan seimbang. Dalam kaitan ini, jabatan Kepala Sekolah yang selama ini ditunjuk oleh pemerintah perlu diganti dengan Kepala Sekolah yang dipilih oleh guru dan kelak apa bila masa jabatan sudah habis Kepala Sekolah akan dievaluasi oleh guru pula. Sekolah dengan bentuk organisasi semacam itu akan memungkinkan sekolah sebagai suatu lembaga yang relatif otonom dari kekuatan politik. Kerja kepala sekolah beserta staf administrasi tim yang demokratis orang tua murid dilibatkan dalam pelaksanaan pendidikan sebagai anggota bukan sebagai klien. Dari berbagai problem dan tantangan yang menyertainya, baik secara konseptual maupun secara operasional pelaksanaan model manajemen berbasis sekolah terdapat tujuh komponen MBS yaitu manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan, manajemen tenaga kependidikan, manajemen sarpras,manajemen humas dan manajemen layanan khusus, maka urgensi tulisan ini dibuat untuk mengkaji lebih mendalam pada tingkat aktualisasi realitasnya yang lebih nyata. Untuk itu, maka muncullah sistem baru yaitu Sistem Manajemen Berbasis Sekolah. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini pertama kali muncul di Amerika Serikat. Latar belakangnya ketika itu masyarakat mempertanyakan tentang relevansi dan korelasi pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Bertitik tolak dari kondisi tersebut, dipandang perlu membangun suatu sistem persekolahan yang mampu memberikan kemampuan dasar bagi peserta didik. Muncullah penataan sekolah melalui konsep MBS yang diartikan sebagai wujud dari reformasi pendidikan yang meredesain dan memodifikasi struktur pemerintah ke sekolah dengan pemberdayaan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Sistem Manajemen Berbasis Sekolah merupakan suatu sistem yang menuntut agar sekolah dapat secara mandiri, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah (Mulyasa, 2006: 24). Pembelajaran berbasis kompetensi menekankan pembelajaran ke arah penciptaan dan peningkatan serangkaian kemampuan dan potensi siswa agar bisa mengantisipasi tantangan aneka kehidupannya. Sehingga orientasi pembelajaran yang selama ini lebih ditekankan pada aspek “pengetahuan” dan target “materi” yang cenderung verbalistis berubah menjadi lebih ditekankan pada aspek “kompetensi” dan target “keterampilan”. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Peningkatan mutu pembelajaran merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan secara terus menerus dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan pembelajaran, dengan tujuan agar menjadi target sekolah dapat tercapai.

Keberhasilan pendidikan dengan sistem MBS ini dapat diukur dari indikator-indikator yang meliputi : *input, proses, output dan outcome*. (Engkoswara, 1988 : 54). Pertama, input yaitu diantaranya adalah kualitas guru haruslah profesional dalam mengembangkan ide kreativitasnya sehingga dapat menunjang mutu pembelajaran*.* Kedua, proses pembelajaran, pada umumnya pembelajaran ditekankan pada proses pengajaran oleh guru (teacher teaching) dibandingkan dengan proses pembelajaran oleh murid (student learning). Hal ini menyebabkan proses belajar menjadi statis dan beku. Oleh karena itu untuk memperbaiki mutu pendididkan, upaya pemberdayaan pembelajaran yang difokuskan siswa belajar menjadi sangat penting. Pemberdayaan yang dimaksud tidak akan meninggalkan fungsi dan peran guru, sehingga keterampilan guru dalam mengelolah pembelajaran sangat dibutuhkan. (Rahardja, 2002 : 5). Ketiga, output diantaranya adalah masyarakat dan dunia usaha. Hal ini pula yang menjadi tolak ukur peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, karena sekolah yang baik merupakan suatu kebanggaan baik bagi pengelola (yayasan) atau pun bagi masyarakat sekitar (Fattah,1999 :3 ). Adapun untuk dunia usaha itu juga merupakan suatu bukti ada tidaknya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah tersebut, semakin baik dunia usaha yang dimiliki lulusan sekolah tersebut maka semakin baik juga pula mutu sekolah tersebut. Keempat*,* outcome meliputi jumlah lulusan ketingkat pendidikan berikutnya.

Pada dasarnya model manajemen berbasis sekolah adalah model pengelolaan pendidikan yang mencoba diterapkan oleh sekolah-sekolah negeri maupun swasta, tidak terkecuali dengan SMA Negeri 1 Talibura yang juga telah menggunakan model manajemen berbasis sekolah. Setelah peneliti mengadakan pengamatan awal, bahwa diketahui di SMA Negeri 1 Talibura terdapat permasalahan yang kompleks mengenai implementasi MBS yang dilakukan oleh kepala sekolah, terutama tentang guru yang kurang profesional. Dalam hal ini ada sebagian guru yang malas mengajar dan hanya disibukkan dengan kepentingan sendiri, selain itu disiplin waktu kurang diperhatikan oleh guru sehingga jam mengajar yang semestinya, tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Menurut hemat penulis, bahwa salah satu penyebab terjadinya kurang efektif seorang guru dalam proses belajar mengajar ialah belum maksimal terlaksananya MBS yang dilakukan oleh kepala sekolah.

SMA Negeri 1 Talibura sebagai sebuah lembaga pendidikan yang telah berdiri cukup lama dikenal sebagai sebuah lembaga yang memiliki segudang prestasi yang sangat membanggakan baik ditingkat kecamatan, kabupaten, bahakan sampai pada tingkat propinsi. Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang di bawah naungan pemerintah, maka yang dilakukan tentu saja didasarkan pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik dalam bidang administrasi, proses pendidikan, proses pengelolaan dan lain sebagainya. Karena orientasi kurikulum sekarang mengacu pada peningkatan kualitas manajemen yang berbasis sekolah, maka penekanan pengembangan yang semula berorientasi pada kuantitas berubah menjadi kualitas, mandiri, dan disentralisasi. Namun realitasnya bahwa belum sepenuhnya sekolah ini mampu melaksanakan school based management atau MBS yang diharapkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa realitas di lapangan memperlihatkan bahwa semakin besarnya harapan yang digantungkan masyarakat terhadap tugas guru dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Namun dalam kenyataannya beberapa hambatan-hambatan, seperti halnya pemberdayaan kompetensi guru kurang memadai, administrasi pembelajaran yang kurang efektif, ilmu pengetahuan dan sarana pendukung pembelajaran serta di mana kultur masyarakat bertumpu pada konsep pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu peran kepala sekolah sebagai supervaisor diharapkan menjadi sosok yang mengupayakan pemberian semangat atau motivasi bagi para guru agar senantiasa menjalankan tugas pembelajarannya secara maksimal sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul: “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di SMA Negeri 1 Talibura Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur”.

1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian ini adalah ”Bagaimana Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMA Negeri 1 Talibura Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur?”

1. **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Manajemen Berbasis sekolah (MBS) di SMA Negeri 1 Talibura Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur.

1. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat teoritis dan praktis dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis sebagai bahan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Administrasi pendidikan.
2. Manfaat praktis adalah sebagai berikut:
3. Sebagai bahan informasi bagi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan umumnya dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Sikka pada umumnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
4. Sebagai bahan informasi kepada mereka yang berprofesi guru dalam menggali informasi penting tentang manajemen berbasis sekolah.
5. Sumber pengetahuan aktual bagi pengelola sekolah (kepala sekolah, yayasan pendidikan) dalam penerapan manajemen berbasis sekolah.
6. Memacu partisipasi aktif masyarakat dalam memajukan mutu pendidikan.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Tinjauan Pustaka**
2. **Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah**

Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari *school based management.* Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat*.* Manajemen Bebasis Sekolah (MBS) merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas kapada tingkat satuan pendidikan (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola dan mangatur sumberdaya dan mengalokasikan dana sesuai dengan perioritas kebutuhan.Pengertian manajemen berbasis sekolah menurut beberapa ahli

Slameto (2002:2) mengemukakan bahwa manajemen berbasis sekolah berasal dari tiga kata yaitu: Manajemen, Berbasis, dan Sekolah. Manajemen adalah pengkordinasian, dan penyesuaian sumber daya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan bentuk alternatif pengelolaan sekolah dalam rangka desentaralisasi pendidikan, yang di tandai adanya kewenangan pengambilan keputusan yang lebih luas di tingkat sekolah, partispasi masyarakat yang relatif tinggi, dalam kerangka kebijakan pendidikan Nasional.

 9

Mulyasa (2004 : 24) mengemukakan bahwa :

MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staff, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat

terhadap pendidikan.

Fatah (2006 : 32) mengemukakan bahwa :

MBS merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, komite sekolah, orang tua siswa dan masyarakat. Manajemen berbasis sekolah mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat lokal (*Local stakeholder).*

Sudjanto (2005 : 37) mengemukakan bahwa:

MBS merupakan model manajemen pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Di samping itu, MBS juga mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah yang dilayani dengan tetap selaras pada kebijakan nasional pendidikan. Hal yang penting dalam implementasi/pelaksanaan manajemen berbasis sekolah adalah manajemen terhadap komponen-komponen sekolah itu sendiri.

Para pakar memberikan konsep MBS dari sudut pandang yang berbeda-beda akan tetapi maknanya tidak jauh berbeda mengacu pada peningkatan mutu. Malen, Ogawa, dan Kranz (2002:16) mendefinisikan mengemukakan bahwa manajemen bebasis sekolah secara konseptual dapat di gambarkan sebagai suatu perubahan formal struktur penyelenggaraan, sebagai suatu bentuk desentaralisasi yang mengidentifikasikan sekolah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan serta bertumpu pada redistribusi kewenangan pembuatan keputusan sebagai sarana penting dengannya peningkatan dapat di dorong dan di topang.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa MBS merupakan salah satu bentuk desentaralisasi pendidikan yang di terapkan dimasing-masing sekolah sebagai pelaksana untuk mengembangkan diri sesuai dengan otoritas yang dimiliki. Lebih lanjut Candoli (2002:16) memberikan konsep bahwa suatu cara untuk memaksakan sekolah itu sendiri mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi pada anak menurut juridisnya dan mengikuti sekolahnya. Konsep ini menegaskan bahwa, ketika sekolah itu sendiri dibebani dengan pengembangan total program kependidikan yang bertujuan melayani kebutuhan-kebutuhan anak dalam mengikuti sekolah khusus itu, personil sekolah akan mengembangkan program-program yang telah meyakini karena mereka mengetahui para siswa dan kebutuhan mereka.

Pernyataan yang berbeda dengan konsep di atas, Slamet (2002:17) menyatakan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumberdaya yang di lakukan secara otomatis dan mandiri oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan Nasional, dengan melibatkan semua kelompok berkepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif.

BPPN dan Bank Dunia (dalam Mulyasa, 2002:11) membrikan konsep bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentaralisasi di bidang pendidikan, yang di tandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikn Nasional. MBS merupakan suatu penawaran bagi sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik.

Dalam sistem MBS, semua kebijakan dan program sekolah di tetapkan oleh Komite sekolah dan dewan Pendidikan. Badan ini merupakan lembaga yang di tetapkan berdasarkan musyawarah dari pada pejabat daerah setempat. Komisi pendidikan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pejabat pendidikan Daerah, kepala sekolah, tenaga kependidikan, perwakilan orang tua peserta didik, dan tokoh masyarakat. Lembaga inilah yang menetapkan segala kebijakan sekolah berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang pendidikan yang berlaku.

1. **Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah**

Tujuan utama manajemen berbasis sekolah adalah meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. peningkatan efisiensi di peroleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionlisme guru, adanya hadia dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuh sementara itu baik berdasarkan kajian pelaksanaan di Negara-negara lain, maupun yang tersurat dan tersirat dalam kebijakan pemerintah dan UU sisdiknas No. 20 Tahun 2003, tentang pendidikan berbasis masyarakat pada ayat 1 : masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan pasal tersebut setidaknya ada empat aspek yaitu : kualitas (mutu) dan relevansi, keadilan, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.

1. MBS bertujuan mencapai mutu *quality* dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya, dengan tolak ukur penilaian pada hasil *output* dan *outcome* bukan pada metodologi atau prosesnya. Mutu dan relevansi ada yang memandangnya sebagai satu kesatuan substansi, artinya hasil pendidikan yang bermutu sekaligus yang relevan dengan berbagai kebutuhan dan konteksnya. Bagi yang memisahkan keduanya, maka mutu lebih merujuk pada dicapainya tujuan spesifikoleh siswa (lulusan), seperti nilai ujian atau prestasi lainnya, sedangkan relevansi lebih merujuk pada manfaat dari apa yang di peroleh siswa melalui pendidikan dalam berbagai lingkup/tuntutan kehidupan (dampak), termasuk juga ranah pendidikan yang tidak diujikan.
2. MBS bertujuan menjamin keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu di sekolah yang bersangkutan. Dengan asumsi bahwa setiap anak berpotensi untuk belajar, maka MBS memberi keleluasaan kepada setiap sekolah untuk menangani setiap anak dengan latar belakang sosial ekonomi dan psikilogi yang beragam untuk memperoleh kesempatan dan layanan yang memungkinkan semua anak dan masing-masing anak berkembang secara optimal. Sungguh pun anatara sekolah harus saling memacu prestasi, tetapi setiap sekolah harus melayani setiap anak (bukan hanya yang pandai), dan secara keseluruhan sekolah harus mencapai standar kompetensi minimal bagi setiap anak yang diluluskan.
3. MBS bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Efektifitas berhubungan dengan proses, prosedur, dan ketepat-gunaan semua input yang dipakai dalam proses pendidikan di sekolah, sehingga menghasilkan hasil belajar siswa seperti yang diharapkan (sesuai tujuan). Sebaliknya untuk mencapai hasil yang baik, diupayakan menerapkan indicator-indikator atau ciri-ciri sekolah efektif. Dengan menerapkan MBS diharapkan setiap sekolah, sesuai kondisi masing-masing, dapat menerapkan metode yang tepat (yang dikuasai),dan input lain yang tepat pula (sesuai lingkungan dan konteks sosial budaya), sehingga semua input tepat guna dan tepat sasaran. Atau dengan kata lain, efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara itu, efisiensi berhubungan dengan nilai uang yang dikeluarkan atau harga (cots) untuk memenuhi semua input (proses dan semua input yang digunakan dalam proses) dibandingkan atau dihubungkan dengan hasilnya (hasil belajar siswa).
4. MBS bertujuan meningkatkan akuntabilitas sekolah dan komitmen semua stakeholders. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas semua yang dikerjakan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang diperolehnya. Selama ini pertanggungjawaban sekolah lebih pada masalah administrative keuangan dan bersifat vertikal sesuai jalur birokrasi. Pertanggungjawaban yang bersifat teknis edukatif terbatas pada pelaksanaan program sesuai petunjuk dan pedoman dari pusat (pusat dalam arti nasional, maupun pusat-pusat birokrasi dibahwanya), tanpa pertanggung jawaban hasil pelaksanaan program.
5. **Karakteristik MBS**

Karakteristik dapat diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerjanya, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta system administrasi secara keseluruhan. Sejalan dengan itu mengutip pendapat Saud, Mulyasa mengemukakan karakteristik dasar MBS antara lain :

a). Pemberian otonomi luas kepada sekolah

 MBS memberikan otonomi luas kepada kepala sekolah, disertai dengan seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi tersebut pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi sesuai dengan strategi setempat, sekolah dapat lebih memberdayakan tenaga kependidikan guru agar lebih berkonsentrasi pada tugas utamanya. Kemudian melalui otonomi yang luas pula, sekolah dapat meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dengan menawarkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan keputusan yang diambil secara proposional dan secara professional.

b). Partisipasi masyarakat dan orang tua

Dalam MBS, pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah.

c). kepemimpinan sekolah yang demokratis dan professional

Guru-guru yang direkrut oleh sekolah adalah pendidik professional dalam bidangnya masing-masing. Sehingga mereka bekerja berdsarkan pola kinerja professional yang disepakati bersama untuk memberi kemudahan dan mendukung keberhasilan pembelajaran peserta didik.

d). Team-Work yang kompak dan transparan

Dalam MBS, keberhasilan program-program sekolah didukung oleh kinerja team-work yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di sekolah. Dalam dewan pendidikan dan komite sekolah misalnya, pihak-pihak yang terlibat bekerja sama secara harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing untukmewujudkan suatu “sekolah yang dapat dibanggakan” oleh semua pihak.

Menurut Mulyasa (2003: 24) manajemen berbasis sekolah merupakan paradigm baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikannasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan.

Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Sejalan dengan jiwa dan semangat desentralisasi serta otonomi dalam bidang pendidikan, kewenangan sekolah juga berperan dalam menampung konsensus umum yang menyakini bahwa sedapat mungkin keputusan seharusnya dibuat oleh mereka yang memiliki akses paling baik terhadap informasi setempat, yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan dan yang terkena akibat-akibat dari kebijakan tersebut.

Menurut Mulyasa (2003: 25) manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi, yang dinyatakan dalam GBHN. Hal tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara makro, meso, maupun mikro. Manajemen berbasis sekolah yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respons pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi, antara lain, diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumberdaya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh, antara lain, melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif serta disinsentif.

Manajemen sekolah pada hakekatnya mempunyai pengertian yanghampir sama dengan manajemen pendidikan. Ruang lingkup di bidang kajian menajemen sekolah juga merupakan ruang lingkup dan bidang kajian menajamen pendidikan.

**4. Faktor-faktor yang mempengaruhi MBS**

Selain mempunyai beberapa tujuan dan manfaat dalam penerapan manajemen berbasis sekolah juga banyak terdapat faktor yang mempengaruhi terhadap kemajuan sekolah. Oleh sebab itu, implementasi manajemen berbasis sekolah membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak agar dapat terlaksana dengan baik.

Menurut mulyasa (2004:89) bahwa faktor yang mempengaruhi manajemen berbasis sekolah adalah : “Hal-hal yang mempengaruhi manajemen berbasis sekolah yaitu kewajiban sekolah, kebijakan dan prioritas sekolah, peranan orang tua dan masyarakat, peranan profesionalisme, manajerial dan pengembangan profesi serta secara keseluruhan pada keterbatasan sumber daya”

1. **Komponen-komponen MBS**

Menurut Mulyasa (2004 : 118) sebagai hal yang paling penting dalam implementasi MBS adalah manajemen terhadap komponen-komponen sekolah yang diantaranya terdapat tujuh komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen Kurikulum

Manajemen merupakan kegiatan yang dititik beratkan kepada kelancaran pembinaan situasi belajar mengajar. Kurikulum adalah segalah pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh anak didik, baik dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Pengalaman anak didik di sekolah dapat di peroleh melalui berbagai kegiatan pendidikan antar lain: mengikuti pelajaran di kelas, praktik keterampilan, latihan-latihan olahraga dan kesenian dan kegiatan karya wisata atau praktik dalam laboratorium di sekolah.

Tujuan manajemen kurikulum untuk mengakomodasi perbedaan pandangan tersebut, Hasan (1988) mengemukakan bahwa tujuan dasar kurikulum dapat ditinjau dalam empat dimensi, yaitu:

* Kurikulum sebagai suatu ide, adalah kurikulum yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan.
* Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, adalah sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide yang diwujudkan dalam bentuk dokumen, yang di dalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu.
* Kurikulum sebagai suatu kegiatan, merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, dan dilakukan dalam bentuk praktek pembelajaran.
* Kurikulum sebagai suatu hasil, merupakan konsekwensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan, dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta didik.

Dengan demikian, pengembangan kurikulum meliputi penyusunan dokumen, implementasi dokumen serta evaluasi dokumen yang telah disusun (Wina Sanjaya, 2008). Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa: “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

1. Manajemen kesiswaan

Mulyasa (2003: 45) manajemen kesiswaan atau manejemen kemuridan (peserta didik) merupakan salah satu bidang operasional MBS. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah.

Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut bidang manajemen kesiswaan sedikitnya memiliki tiga tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin.

1. Manajemen Tenaga kependidikan

Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang harus dilaksanakan pimpinan, adalah menarik, mengembangkan, menggaji, dan memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karier tenaga kependidikan, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi.

1. Manajemen Keuangan

Dalam penyelenggaraan pendidikan, manajemen keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. komponen-komponen manajemen keuangan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen yang lain.

Dalam rangka implementasi MBS, manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik, dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pegawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran serta bebas dari penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme.

1. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan

Mulyasa (2003: 49) sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi dan penghapusan serta penataan.

1. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat.

Masyarakat merupakan partner sekolah dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran. Hubungan sekolah dengan masyarakat sebenarnya sudah didesentralisasikan tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk (1) meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak. (2) memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidupdan penghidupan masyarakat. Dan (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.

Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan harmonis, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi. Agar tercipta hubungan dan kerja sama yang baik antara sekolah dengan masyarakat, masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Gambaran tersebut dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui laporan kepada orang tua murid, bulletin bulanan, penerbitan surat kabar, pameran sekolah, open house, kunjungan ke sekolah, kunjungan ke rumah murid, penjelasan oleh staff sekolah, murid, radio, televisi, dan laporan tahunan.

Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Melalui hubungan yang harmonis tersebut, diharapkan tercapai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu terlaksananya proses pensisikan disekolah secara produktif, efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang produktif dan berkualitas.

1. Manajemen layanan khusus

Manajemen layanan khusus meliputi : manajemen perpustakaan, kesehatan dan keamanan sekolah.

Perpustakaan sekolah sebagai sarana pendidikan yang sangat penting harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. Terlebih bila kita lihat perkembagan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini demikian pesatnya, maka peranan buku sebagai sumber informasi sangat kuat dan mutlak diperlukan di sekolah. Agar penggunaan perpustakaan sekolah dapat berjalan tertib,efektif dan efisien diperlukan berbagai kelengkapan tata laksana, anatara lain : tata tertib perpustakaan, buku induk anggota perpustakaan, buku induk bahan pustaka, almari catalog, kartu buku, kantong buku, lembar pengambilan, kartu peminjam, label buku, blangko peringatan, dan kartu catalog.

Manajemen layanan khusus lainnya adalah layanan kesehatan dan keamanan. Sekolah sebagai satuan pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan proses pembelajaran, tidak hanya bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap saja, tetapi harus menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani peserta didik. Di samping itu, sekolah juga perlu memberikan pelayanan keamanan kepada peserta didik dan para guru yang ada di sekolah agar mereka dapat belajar dan melaksanakan tugas dengan tenang dan aman.

1. **Langkah-langkah MBS**

Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi MBS akan berhasil melalui strategi-strategi berikut ini :

**Pertama,** sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal, yaitu dimilikinya otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan ketrampilan secara berkesinambungan, akses informasi ke segala bagian dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil.

**Kedua,** adanya peran serta masyarakat secara aktif, dalam pembiayaan, proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum. Sekolah harus lebih banyak mengajak lingkungan dalam mengelola sekolah karena bagaimanapun sekolah adalah bagian dari masyarakat luas.

**Ketiga,** Kepala sekolah harus menjadi sumber inspirasi atas pembangunan dan pengembangan sekolah secara umum. Kepala sekolah dalam MBS berperan sebagai designer, motivator, fasilitator. Bagaimanapun kepala sekolah adalah pimpinan yang memiliki kekuatan untuk itu. Oleh karena itu, pengangkatan kepala sekolah harus didasarkan atas kemampuan manajerial dan kepemimpinan dan bukan lagi didasarkan atas jenjang kepangkatan.

**Keempat,** adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif. Dalam pengambilan keputusan kepala sekolah harus mengembangkan iklim demokratis dan memperhatikan aspirasi dari bawah. Konsumen yang harus dilayani kepala sekolah adalah murid dan orang tuanya, masyarakat dan para guru. Kepala sekolah jangan selalu menengok ke atas sehingga hanya menyenangkan pimpinannya namun mengorbankan masyarakat pendidikan yang utama.

**Kelima***,* semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya secara bersungguh-sungguh.Untuk bisa memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing harus ada sosialisasi terhadap konsep MBS itu sendiri. Siapa kebagian peran apa dan melakukan apa, sampai batas-batas nyata perlu dijelaskan secara nyata.

**Keenam***,* adanya pedoman dari departemen pendidikan terkait sehingga mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif. Pedoman itu jangan sampai berupa peraturan-peraturan yang mengekang dan membelenggu sekolah. Artinya, tidak perlu lagi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan MBS, yang diperlukan adalah rambu-rambu yang membimbing.

**Ketujuh***,* sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal diwujudkan dalam laporan pertanggungjawabannya setiap tahunnya. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap semua stakeholder. Untuk itu, sekolah harus dijalankan secara transparan, demokratis, dan terbuka terhadap segala bidang yang dijalankan dan kepada setiap pihak terkait.

**Kedelapan***,* Penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar siswa. Perlu dikemukakan lagi bahwa MBS tidak bisa langsung meningkatkan kinerja belajar siswa namun berpotensi untuk itu. Oleh karena itu, usaha MBS harus lebih terfokus pada pencapaian prestasi belajar siswa.

**Kesembilan,** implementasi diawali dengan sosialsasi dari konsep MBS, identifikasi peran masing-masing pembangunan kelembagaan *capacity building* mengadakan pelatihan terhadap peran barunya, implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan dilapangan dan dilakukan perbaikan-perbaikan. Bagi sekolah yang sudah beroperasi ( sudah ada / jalan) paling tidak ada 6 (enam) langkah, yaitu : 1) evaluasi diri *self assessment;* 2) Perumusan visi, misi, dan tujuan; 3)Perencanaan; 4) Pelaksanaan; 5) Evaluasi; dan 6) Pelaporan

1). *Evaluasi diri self assessment*

Evaluasi diri sebagai langkah awal bagi sekolah yang ingin, atau akan melaksanakan manajemen mutu berbasis sekolah. Kegiatan ini mulai dengan curah pendapat brainstorming yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan seluruh staf, dan diikuti juga anggota komite sekolah. Prakarsa dan pimpinan rapat adalah kepala sekolah. Memancing minat acara rapat dapat di mulai dengan pertanyaan seperti : perluhkah kita meningkatkan mutu? Seperti apakah kondisi sekolah kita dalam hal mutu pada saat ini? Mengapa sekolah kita tidak/belum bermutu?

2). Perumusan Visi, Misi, dan tujuan

Bagi sekolah yang baru berdiri atau baru didirikan, perumusan visi dan misi serta tujuan merupakan langkah awal/pertama yang harus dilakukan yang menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin di tujuh oleh para pendiri**/** penyelenggara pendidikan.

Dalam kasus sekolah negeri kepala sekolah bersama guru mewakili pemerintah kab/kota sebagai pendiri dan bersama wakil masyarakat setempat ataupun orang tua siswa harus merumuskan kemana sekolah kemasa depan akan di bawah, sejauh tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional seperti tercantum dalam UU No. 23 tahun 2003 tentang sisdiknas. Kondisi yang diharapkan**/** diinginkan dan diimpikan dalam jangka panjang itu, kalau dirumuskan secara singkat dan menyeluruh di sebut **visi**. Keadaan yang diinginkan tersebut hendaklah ada kaitannya dengan idealisme dan mutu pendidikan. Idealisme di sini dapat berkaitan dengan kebangsaan, keadilan, keluhuran budi pekerti, ataupun kualitas pendidikan sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Sedangkan **misi,** merupakan jabaran dan visi merupakan komponen-komponen pokok yang harus direalisasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain, misi merupakan tugas-tugas pokok yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Tujuan merupakan tahapan antara, atau tonggak-tonggak penting antara titik berangkat (kondisi awal) dan titik tiba tujuan akhir yang rumusannya tertuang dalam bentuk visi-misi. Tujuan-tujuan antara ini sebagai tujuan jangka menengah kalau tibah saatnya berakhir (tahun yang ditetapkan) akan di susul dengan tujuan berikutnya, sedangkan visi dan misi (relative/pada umumnya) masih tetap. Tujuan (jangka menengah), di penggal-penggal menjadi tujuan tahunan yang biasa di sebut target / sasaran, dalam formulasi yang jelas baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan-tujuan jangka pendek (1 tahun) inilah yang rincian persiapannya dalam bentuk perencanaan.

3). Perencanaan

 Perencanaan pada tingkat sekolah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjawab : apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya untuk mewujudkan tujuan (tujuan-tujuan) yang telah ditetapkan / disepakati pada sekolah yang bersangkutan, termasuk anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan. Dengan kata lain perencanaan adalah kegiatan menetapkan lebih duluh tentang apa-apa yang harus dilakukan, prosedurnya serta metode pelaksanaannya untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau satuan organisasi.

Perencanaan oleh sekolah merupakan persiapan yang teliti tentang apa-apa yang akan dilakukan dan skenario melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dalam bentuk tertulis. Dikatakan teliti karena ia harus menjelaskan apa yang akan dilakukan, seberapa besar lingkup cakupan kuantitatif yang akan dikerjakan, bagaimana, kapan dan berapa perkiraan satuan-satuan biayanya, serta hasil seperti apa yang diharapkan.

4). Pelaksanaan

Apabila kita bertitik tolak dari funsi-fungsi manajemen yang umumnya kita kenal sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan/penggerakkan atau pimpinan dan kontrol/pengawasan serta evaluasi, maka langkah pertama sampai dengan ketiga dapat digabungkan fungsi perencanaan yang secara keseluruhan (untuk sekolah). Di dalam pelaksanaan tentu masih ada kegiatan perencanaan-perencanaan yang lebih mikro (kecil) baik yang terkait dengan penggalan waktu (bulanan, semesteran, bahkan mingguan), atau yang terkait erat dengan kegiatan khusus, misalnya menghadapi lombah bidang studi, atau kegiatan lainnya. Tahap pelaksanaan, dalam hal ini pada dasarnya menjawab bagaimana semua fungsi manajemen sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan orang lain dan dengan sumber daya yang ada, dapat berjalan sebagaimana mestinya (efektif dan efisien). Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan merealisasikan apa-apa yang telah direncanakan.

Selanjutnya sidi, mengemukakan bahwa kemandirian sekolah yang ditegaskan dalam manajemen berbasis sekolah, sangat menekankan pada optimalisasi pelaksanaan proses belajar mengajar, partisipasi masyarakat dan kinerja kepala sekolah. Khususnya mengenai pelaksanaan belajar mengajar, guru-guru memegang peranan yang sangat menentukan, sebab sekalipun sarana dan prasarana pendidikan lengkap dan mempunyai sumber dana yang cukup memadai, tetapi kalau sumber daya manusianya yaitu para guru-gurunya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dalam proses belajar mengajar, maka tidak dapat diharapkan mutu output pendidikan akan meningkat.

**B. Kerangka Pikir**

Sekolah di pandang sebagai suatu organisasi yang didesain untuk dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan derajat sosial masyarakat bangsa, sekolah sebagai institusi pendidikan perlu di kelola, diatur, dan diberdayakan agar sekolah dapat menghasilkan produk atau hasil secara optimal. Dengan kata lain, sekolah sebagai lembaga tempat penyelenggaraan pendidikan, merupakan system yang memiliki berbagai perangkat dan unsur yang saling berkaitan yang memerlukan pemberdayaan.

Sekolah sebagai institusi/lembaga pendidikan, merupakan wadah tempat proses pendidikan dilakukan, memiliki system yang kompleks dan dinamis. Dalam kegiatannya, sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpul guru dan murid, melainkan berada dalam satu tatanan system yang rumit dan saling berkaitan, oleh karena itu sekolah di pandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan.

Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah secara efektif dan efisien, merupakan suatu upaya peningkatan pengelolaan dan pemberdayaan sekolah sebagai lembaga pendidikan. implikasi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah adalah perlunya dukungan dan peran aktif kepala sekolah, guru dan masyarakat sebagai pihak yang terkait dengan proses belajar mengajar di sekolah.

Dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah sebagai puncak pimpinan perlu memiliki pengetahuan kepemimpinan, perencanaan dan pandangan yang luas tentang sekolah dan pendidikan. Wibawa kepala sekolah harus ditumbuhkembangkan dengan meningkatkan sikap kepedulian, semangat belajar, disiplin kerja, keteladanan dan hubungan manusiawi sebagai modal perwujudan iklim kerja yang kondusif.

Kepala sekolah dituntut untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai manejer sekolah dalam meningkatkan proses belajar mengajar, dengan melakukan supervisi kelas, membina dan memberikan saran-saran positif kepada guru. Di samping itu kepala sekolah juga harus melakukan tukar pikiran sumbang saran, studi banding antara sekolah untuk menyerap kiat-kiat kepemimpinan dari kepala sekolah yang lain.

Guru kelas sebagai pelaksana proses belajar mengajar di kelas harus dapat berkreasi dalam meningkatkan manajemen kelas. Guru memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar sebab sekalipun sarana dan prasarana pendidikan lengkap dan mempunyai sumber dana yang cukup memadai, tetapi kalau sumber daya manusia yaitu para guru tidak melaksanakan tugas dengan baik dalam proses belajar mengajar, maka tidak dapat diharapkan kualitas pendidikan para murid, akan meningkat.

Guru adalah teladan dan panutan langsung para peserta didik di kelas, oleh karena itu guru perluh siap dengan segala kewajiban baik manajemen maupun persiapan isi materi pengajaran. Guru juga harus mampu mengorganisasikan kelas dengan baik, jadwal pelajaran, pembagian tugas peserta didik, penempatan alat dan lain-lain harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Suasana kelas yang menyenangkan dan penuh disiplin sangat diperlukan untuk mendorong semangat belajar peserta didik, kreativitas dan daya cipta guru untuk pelaksanaan MBS perlu terus menerus perlu di dorong dan dikembangkan. Partisipasi masyarakat secara material dalam pendanaan operasional sekolah seperti pemberian beasiswa, menjadi sponsor dalam suatu kegiatan sekolah serta bantuan moral yang diharapkan seperti orang tua asuh bagi anak-anak usia sekolah yang kurang mampu, memberikan masukan berupa pendapat dan pemikiran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dengan demikian pelaksanaan manajemen bebasis sekolah terdapat tujuh komponen yang harus di kelolah dengan baik yakni manajemen kurikulum, kesiswaan, tenaga kependidikan, keuangan, sarpras, humas,dan layanan khusus. Jika ke tujuh unsur tersebut terlibat secara aktif dan kreatif dalam proses belajar mengajar di sekolah, dapat diharapkan kualitas pendidikan peserta didik (murid) akan meningkat sehingga mampu mengikuti perkembangan dan tuntutan untuk tahap pendidikan selanjutnya.

Manajemen Berbasis Sekolah

1. Manajemen Kurikulum
2. Manajemen Tenaga kependidikan
3. Manajemen Kesiswaan
4. Manajemen Keuangan
5. Manajemen Sarana dan prasarana pendidikan
6. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat
7. manajemen layanan khusus

Pelaksanaan MBS di SMA Negeri 1 Talibura

  **Gambar 2.1. Sketsa Kerangka Pikir**

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

**A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada fenomena kasus yang akan diteliti yaitu implementasi manajemen berbasis sekolah tentang tujuh komponen utama yaitu manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan, manajemen tenaga kependidikan, manajemen sarpras, manajemen humas dan manajemen layanan khusus.

Hal ini bersesuaian dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pendekatan Kualitatif dalam penelitian ini termasuk pada jenis fenomenologi yaitu penelitian yang berorientasi untuk memahami, menggali, dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena dan hubungan dengan orang-orang tertentu.

**B. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data sehingga keberadaannya di lokasi penelitian mutlak diperlukan.

35 Gambar 2.1 Kerangka Pikir

 Berdasarkan hal tersebut, kehadiran peneliti dalam penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari pengamatan secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan melibatkan diri dalam pelaksanaan kegiatan yang diteliti dan bukan bermaksud mempengaruhi obyek yang akan diteliti tapi semata-mata untuk mendapatkan data yang akurat.

**C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 1 Talibura Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur, dengan penelitian lapangan yakni dengan melakukan pengumpulan data penelitian secara langsung pada obyek dengan maksud diperoleh data lapangan yang dijamin kebenaran dan kesahihannya, dalam bentuk pengajuan wawancara dan dokumentasi.

**D. Sumber Data**

Sesuai observasi yang telah dilakukan pada objek penelitian, yang menjadi sumber data adalah kepala sekolah, guru, dan pegawai perpustakaan SMA Negeri 1 Talibura yang jumlahnya 35 orang sebagai informan utama dan pendukung, yang terdiri dari 1 orang kepala Sekolah, Wakasek 1 orang, guru 25 orang dan pegawai 8 orang, jumlah yang lumayan banyak dan serta dapat dijangkau, memungkinkan peneliti dapat menjalankan penelitiannya dengan sangat mudah.

**E.Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk pengumpulan data dan informasi di lapangan, maka dapat ditempuh dua teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

1. **Teknik Wawancara**

Kegiatan wawancara terhadap informan, peneliti menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara menjadi pemandu dalam perolehan data. Namun wawancara tidaklah terfokus pada pedoman tersebut, tetapi akan dikembangkan sesuai kondisi lapangan pada saat wawancara berlangsung.

Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara verbal kepada responden yang merupakan subjek penelitian. Hal-hal yang akan diwawancarakan dengan ruang lingkup mengenai : Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Talibura Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur yaitu manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan, manajemen tenaga kependidikan, manajemen sarpras, manajemen humas dan manajemen layanan khusus. Sedangkan sumber data yang akan diwawancarai sebagai sumber utama adalah kepala sekolah dan guru.

1. **Dokumentasi**

Studi dokumentasi berdasarkan pendapat Arikunto (2002 : 206) yang mengatakan bahwa “Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variabel* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kantor, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya”.

Sedangkan menurut Sugiyono (2006 : 329) mengemukakan bahwa: “Studi dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang.”

Studi dokementasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian kualitatif semakin kredibel setelah didukung dokumen kegiatan yang berhubungan dengan implementasi manajemen berbasis sekolah di lapangan.

Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber tertulis seperti dokumen-dokumen resmi, silabus dan RPP guru-guru di SMA Negeri 1 Talibura Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur.

**F. Analisis Data**

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera dilakukan proses mengolah data atau yang sering disebut dengan analisis data. Analisis data diartikan sebagai sebuah proses yang membawa bagaimana data diatur, mengorganisasikan apa yang ada ke dalam sebuah pola, ketegori, dan unit deskripsi dasar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Miles dan Huberman (Sugiyono,2005) mengemukakan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun suatu analisis yang tangguh.

1. **Pengecekan keabsahan data**

Menurut Moleong (2000) “kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu : (1) kepercayaan (*kreadibility),* (2) keteralihan (*transferability),* (3)kebergantungan (*dependibility)*, (4) kepastian (*konfermability)*. Dalam penelitian kualitatif ini memakai tiga macam antara lain :

* + - 1. Kepercayaan (*kreadibility)*

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas tersebut ialah dengan teknik triangulasi, sumber, pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, diskusi teman sejawat, dan pengecekan kecakupan refrensi.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan diantaranya kepala sekolah, dan guru-guru, ini dimaksudkan memperoleh informasi yang dapat dipercaya dengan cara mewawancarai dan melihat pernyataan atau jawaban yang diberikan dari informan sehingga data yang diperoleh oleh peneliti dapat dipercaya. Sumber yang dijadikan informan oleh peneliti adalah kepala sekolah selaku perencana dan pengawas dalam pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah sedangkan guru-guru sebagai guru yang langsung mengelola sistem pembelajaran sehingga peneliti menjadikan para informan sebagai sumber informan yang dapat memberikan data yang diperlukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Peneliti melakukan perpanjangan kehadiran di lokasi penelitian dalam menguatkan data yang diperoleh dalam perpanjangan kehadiran.

* + - 1. Kebergantungan ( *depandibility)*

Kriteria yang digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti itu sendiri hal ini bisa di sebabkan karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan.

Pada waktu penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan berhati-hati mengingat peneliti kurang pengalaman dalam melakukan wawancara bersama informan serta dalam mengumpulkan data. Peneliti menjadikan sumber atau informan sebagai seseorang yang telah berpengalaman dalam pelaksanaan *implementasi manajemen berbasis sekolah*. Berdasarkan dengan apa yang menjadi fokus penelitian peneliti, peneliti bergantung pada para informan dalam pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah.

* + - 1. Kepastian (*konfermability)*

Kriteria yang digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacak audit.

Untuk memperoleh kepastian pada sumber data, peneliti merekam proses wawancara sehingga ketika peneliti mendeskripsikan hasil penelitian dapat terpercaya. Dalam menyimpulkan pelaksanaan MBSdi SMA Negeri 1 Talibura, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan keadaan pelaksanaan MBS dilokasi penelitian dengan teori sebagai tolak ukur.

1. **Tahap-Tahap Penelitian**

Tahapan-tahapan penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: (1) tahap pra lapangan, yang meliputi penyusunan rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian; (2) tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data; (3) tahap analisis data, yang meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

1. **Profil Sekolah dan Struktur Organisasi Sekolah**
2. Profil sekolah SMA Negeri 1 Talibura Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur

|  |
| --- |
| **IDENTITAS SEKOLAH** |
| 1 | Nama sekolah | SMA Negeri 1 Talibura  |  |  |
| 2 | Nomor Statistik Sekolah (NSS)  | 302240807013 |  |  |
| 3 | Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | 503002304 |  |  |
| 4 | Nomor Induk Sekolah (NIS) |  |  |  |
| 5 | Status sekolah |  Negeri  |  |  |
| 6 | Tahun berdiri  | 1986 |  |  |
| 7 | Tahun perubahan  | 2003 |  |  |
| 8 | Alamat  | Talibura nangahale |  |  |
| 9 | Desa/kelurahan  | Nangahale  |  |  |
| 10 | Kecamatan  | Talibura |  |  |
| 11 | Kabupaten/Kota | Sikka |  |  |
| 12 | Propinsi  | Nusa Tenggara Timur |  |  |
| 13 | Otonomi Daerah  |  |  |  |
| 14 | Kode Pos | 86183 |  |  |
| 15 | Email  |  |  |  |
| 16 | Daerah  | Pedesaan  |  |  |
| 17 | Telepon/HP  |  |  |  |
| 18 | Koordinat |  |  |  |
| 19 | Kelompok sekolah  |  |  |  |
| 20 | Akreditasi  | B |  |  |
| 21 | Surat kelembagaan | No: Tgl: |  |  |
| 22 | Penerbit SK |  |  |  |
| 23 | Jumlah rombongan belajar/kelas | 10 |  |  |
| 24 | Luas Tanah  | 3000 meter |  |  |
| 25 | Luas Bangunan  |  |  |  |
| 26 | Luas kebun  42 |  |  |  |
| 27 | Status Tanah  | Milik pemerintah |  |  |
| 28 | Jumlah keanggotaan Rayon |  |  |  |
| 29 | Organisasi Penyelenggara | Pemerintah  |  |  |
| 30 | Perjalanan perubahan sekolah |  |  |  |

1. Struktur oerganisasi sekolah SMA Negeri 1 Talibura

 ST RUKTUR ORGANISASI SEKOLAH

 SMA NEGERI 1 TALIBURA

 TAHUN PELAJARAN : 2013/2014

Kepala sekolah

Kepala Tatausaha

Bendahara

Komite Sekolah

Wakasek Kurikulum

Wali Kelas

Guru Mata pelajaran

Koordinator BK

Pengelola perpustakaan

Pengelola Lab IPA

Siswa/Siswi

1. Visi, Misi dan Tujuan SMA Negeri 1 Talibura Kabupaten Sikka

**Visi** SMA Negeri 1 Talibura Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka adalah

Mewujudkan sekolah yang unggul dalam prestasi, berbudaya, berdisiplin, terampil, berwawasan, imtak dan iptek serta memiliki kepedulian sosial kemasyarakatan tinggi.

**Misi** SMA Negeri 1 Talibura Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka :

* Membentuk kepribadian yang dilandasi nilai-nilai moral dan agama.
* Memacu aspek intelektualitas yang mengarah pada penguasaan ilmu dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan.
* Mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas melalui penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.
* Membentuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan professional.
* Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran yang berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan SMA Negeri 1 Talibura sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, dan kepribadian akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

1. Identitas Responden

Responden penelitian ini sebanyak 15 orang terdiri dari seorang kepala sekolah dan 14 orang guru, termasuk di dalamnya wakil-wakil kepala sekolah yang diberi amanat untuk menjalankan tugas-tugas penting di sekolah. Untuk memperoleh informasih yang akurat maka responden dipilih sengaja dari lokasi sampel Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Talibura kabupaten Sikka sebagai syarat memenuhi karateristik sampel yang diteliti. Selanjutnya untuk memperoleh gambaran secara rinci, akan diuraikan karateristik responden sebagai berikut:

1. Pangkat/golongan responden

Semakin tinggi tingkat kepangkatan/golongan merupakan faktor yang diasumsikan signifikan dengan kualitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru.

Tabel 4.1. Karateristik Responden Guru Berdasarkan Pangkat/Golongan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pangkat/golongan | Frekuensi | Persentase |
| II/a-II/d | - | 0 |
| III/a-III/d | 8 | 57,14 |
| IV/a-IV/e | 6 | 42,85 |

Sumber: Data Primer 2014

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 14 responden guru yang dijadikan sampel dapat dibuat perincian sebagai berikut yaitu untuk golongan II/a-II/d adalah 0 persen, untuk golongan III/a-III/d sebanyak 57,14 persen atau sebanyak 8 orang guru sedangkan untuk golongan IV/a-IV/e sebanyak 42,85 persen atau sebanyak 6 orang.

Jika responden guru dianalisis berdasarkan golongan seperti pada tabel yang disajikan di atas, maka responden golongan yang paling tinggi yaitu golongan III/a-IIId yaitu sebanyak 57,14 persen, hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi yang memadai dalam rangka pengembangan manajemen berbasis sekolah dapat terlaksana dengan baik.

1. Tingkat umur responden

Tingkat umur responden dalam penelitian ini dimulai dengan rentangan usia kurang dari 30 tahun sampai dengan 55 tahun ke atas, hal ini diasumsikan keaktifan (enerjik) masa produktifitas dalam pelaksanaan tugas guru.

 Tabel 4.2. Penyebaran Responden guru Berdasarkan Kelompok Umur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pangkat/golongan | F8rekuensi | Persentase |
| $\leq $ 30 tahun | 2 | 14,28 |
| 30> x $\leq $ 45 | 10 | 71,42 |
| 45>x $\leq $ 55 | 2 | 14,28 |
| $>$55tahun | 0 | 0 |

 Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa responden berusia 30 tahun kebawah sebanyak 2 orang atau 14,28 persen, responden berusia lebih dari 30 tahun sampai 45 tahun sebanyak 10 orang atau sekitar 71,42 persen, responden berusia di atas 45 tahun sampai 55 tahun sebanyak 2 orang atau sekitar 14,28 persen, sedangkan respoden berusia di atas 55 tahun ke atas tidak ada atau sebesar 0 persen.

1. Tingkat pendidikan.

Distribusi responden menurut tingkat pendidikan merupakan vaktor terpenting yang diasumsikan mempunyai pengaruh terhadap kualitas kerja responden, sebagaimana yang ditetapkan pemerintah tentang standar pendididkan para guru untuk berbagai jenjang pendidikan. Hal ini terlihat nyata dari langkah konkrit yang ditempuh pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan baik output maupun inputnya dengan memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikan pada level D.A atau setara dengan sarjana.

 Tabel 4.3. Penyebaran Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tingkat Pendidikan | Frekuensi (f) | Persentase |
| SPG sederajat | 0 | 0 |
| Diploma I | 0 | 0 |
| Diploma II | 0 | 0 |
| Diploma III | 0 | 0 |
| Stara satu (S1) | 14 | 100 |
| Strata dua (S2) | 0 | 0 |

Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan responden guru SMA Negeri 1 Talibuara adalah Strata satu (S1) sebagamana yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai standar pendidikan tenaga pendidik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tenaga pendidik SMA Negeri 1 Talibura memenuhi kualitas pendidik standar nasional.

Dalam sebuah lembaga pendidikan, baik lembaga tersebut berada di bawah naungan pemerintah (negeri) atau mandiri (swasta), tingkat dasar, menengah ataupun perguruan tinggi, tentu memerlukan adanya manajemen yang bagus (efektif dan efisien). Karena dengan adanya manajemen yang bagus diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan di sekolah tersebut.

Implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) di SMA Negeri 1 Talibura meliputi :

1. **Manajemen kurikulum**

Manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan menitik beratkan pada usaha peningkatan interaksi belajar mengajar. Kurikulum dalam arti sempit adalah semua pelajaran baik teori maupun praktik yang diberikan kepada siswa selama siswa mengikuti pendidikan tertentu. Kurikulum dalam arti luas adalah semua pengalaman yang diberikan oleh lembaga pendidikan kepada siswa selama mengikuti pelajaran.

1. Perencanaan program pengajaran

Sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yaitu menyeimbangkan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kepala sekolah disini adalah merumuskan silabus dan program pengajaran.

Adapun susunan program pengajaran tersebut adalah :

Tabel 4.4. susunan program pengajaran SMA Negeri 1 Talibura

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Mata pelajaran | Jumlah jam |
|  |  | L | Ll | lll |
| 1 | Bahasa Indonesia  | 4-2 | 4-2 | 4-2 |
| 2 | Kesenian(seni musik, seni rupa,dan seni tari) | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Pendidikan jasmani  | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Matematika | 4-2 | 4-2 | 4-2 |
| 5 | Bahasa inggris | 4-2 | 4-2 | 4-2 |
| 6 | Bahasa jerman | 4-2 | 4-2 | 4-2 |
| 7 | IPA | 4-2 | 4-2 | 4-2 |
| 8 | IPS | 4-1 | 4-1 | 4-1 |
| 9 | Teknologininformasi dan komunikasi | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Kewarganegaraan  | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Muatan lokal |  |  |  |
|  | * Bahasa daerah
 | 1 | 1 | 1 |
|  | * Pkk
 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Pendidikan Agama  | 1 | 1 | 1 |
|  | Jumlah | 48 | 48 | 48 |

 Tanda – berarti mata pelajaran di tambah dari ketentuan kurikulum

Hasil wawancara peneliti peroleh dari informan yaitu wakasek kurikulum SMA Negeri 1 Talibura (BS) yaitu :

Kami membuat program pengajaran dalam manajemen kurikulum berdasarkan hasil kerja sama semua guru-guru dan pegawai-pegawai sekolah serta di lihat dari visi dan misi sekolah yang dipaparkan oleh kepala sekolah. (Hasil wawancara 30 September 2014)

Hal senada dikatakan oleh ibu ME dan ibu HB SMA Negeri 1 Talibura yaitu :

Perencanaan program pengajaran dalam manajemen kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan individual peserta didik, kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memiliki tingkat penguasaan di atas standar yang telah ditentukan (dalam sikap, ketrampilan dan pengetahuan). Oleh karena itu beragam program pengajaran dan pengalaman belajar disediakan sesuai dengan minat dan kemampuan awal peserta didik serta kelengkapan untuk kepentingan kami sebagai guru (Hasil wawancara 9 Oktober 2014).

Berdasarkan jawaban dari informan peneliti dapat simpulkan bahwa rencana program pembelajaran dalam manajemen kurikulum yang telah disiapkan perlu dipahami betul dalam proses pembelajaran peserta didik agar tetap mengarah pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan wujud pelaksanaannya dituangkan dalam program pengajaran dan persiapan bagi guru-guru.

1. Penyusunan kelender pendidikan

Dalam penyusunan kelender pendidikan di sekolah dan menyangkut proses pemembelajaran bagi peserta didik maka guru-guru yang mengutamakan kepentingan siswa dalam belajar harus mampu mendorong suasana belajar yang kreatif dan menyenangkan.

Hasil wawancara peneliti peroleh dari informan yaitu ibu HA SMA Negeri 1 Talibura yaitu :

Ya, kami membuat kelender pendidikan sebab dalam dunia pendidikan harus ada kelender pendidikan, dan di buat ini juga atas persetujuan dari semua lembaga sekolah serta untuk mengetahui apakah proses pembelajaran sudah dijalani atau belum. (Hasil wawancara 30 September 2014)

Hal senada peneliti peroleh dari informan yaitu bapak RN SMA Negeri 1 Talibura yaitu :

Ya karena dalam lembaga pendidikan harus ada kelender pendidikan supaya semua guru dan pegawai yang ada di sekolah ini mengikuti tatatertib yang sudah di buat oleh pihak sekolah karena selama ini masi ada guru-guru yang melalaikan tugas sebagai guru. (Hasil wawancara 15 Oktober 2014)

Berdasarkan jawaban dari informan peneliti dapat simpulkan bahwa dalam penyusunan kelender pendidikan di sekolah tersebut belum terlalu maksimal karena guru-guru ada yang masi melalaikan tugasnya serta belum mengikuti peraturan yang ada di sekolah.

1. Penetapan pelaksanaan evaluasi belajar

Penetapan pelaksanaan kegiatan evaluasi belajar mengajar untuk menghadapi UAS/UAN kelas 3 diadakan penambahan jam pelajaran (les), sedangkan untuk kelas 1 dan 2 jika kurang dalam penguasaan materi diadakan program remedial/perbaikan. Untuk menunjang prestasi belajar siswa baik secara lokal maupun regional dan untuk memantau perkembangan penguasaan SKL, dilaksanakan pembelajaran diluar sekolah atau tempat yang sesuai dengan kompetensi yang di tuju.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, ada 14 responden menjawab ya, bahwa mereka telah melaksanakan evaluasi baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan, tetapi hampir semua responden (12 guru) menjawab mereka melaksanakan evaluasi secara tertulis atau sekitar 85,71 persen sedangkan 2 orang atau sebesar 14,29 persen menjawab evaluasi yang dilakukan dengan cara lisan. Mereka berpendapat bahwa anak-anak menjadi lebih fokkus megikuti ulangan atau ujian dan tidak punya kesempatan untuk menyontek, seperti yang disampaikan oleh Tarsisius Everus dan Regina Rosmali Kenevi yaitu

bentuk penilaian yang saya lakukan adalah menguji siswa dengan cara lisan. Alasan yang sangat mendasar yaitu selain lebih muda memasukkan nilainya siswa, juga mengurangi peluang mereka untuk saling menyontek. Meskipun agak sulit mengontrol siswa yang belum ujian lisan tetapi dapat mengurangi tingkat kecurangan. Jika nilainya dianggap sudah memenuhi kriteria ketuntasan maka tidak perlu dilakukan ujian ulang secara lisan tetapi jika belum memenuhi maka perlu remidial ujian ulang. (5 Oktober 2014)

Sedangkan guru yang melakukan ujian tertulis mempunyai pandangan lain. Christoforus E. Hon mengemukakan

Evaluasi yang dilakukan dalam bentuk tertulis baik di awal pelajaran maupun di akhir pelajaran dilakukanuntuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan oleh guru. Evaluasi tertulis merupakan salah satu cara menanamkan sifat jujur kepada anak-anak dan tidak tergantung pada siapa pun, selain itu tidak ribut, waktu yang diperlukan tidak seperti tes lisan yang cukup menyita waktu yang banyak. Dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan yang ketat untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh anak-anak. ( 7 Oktober 2014)

Sedangkan hasil wawancara dengan kepala sekolah (MM) tentang penetapan pelaksanaan evaluasi belajar yaitu :

Saya selaku supervisor di sekolah ini menyadari bahwa kemampuan mengajar antara guru yang satu dengan yang lain tidaklah sama, tergantung kepada kemampuan setiap guru, setiap 3 bulan sekali saya melakukan supervisi akademik dan supervisi manajerial untuk memantau aktifitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan selama hasil pemantauan masih ada guru yang belum membuat RPP pada hal sudah disiapkan filenya oleh urusan kurikulum dan urusan pengajaran. Di sisi lain, aktifitas pembelajaran yang dilakukan belumlah mengaktifkan siswa sehingga pembelajaran yang sifatnya joyfull learning masih jauh dari harapan. (Hasil wawancara 30 Oktober 2014).

Sedangkan dalam proses pengawasan adalah proses mencocokkan antara aktivitas yang sesungguhnya dilaksanakan dengan rencana yang telah dibuat. Dalam pengawasan dilakukan evaluasi keefektifan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Setiap program selesai dilaksanakan, sekolah mencoba melakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untukmengetahui apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana atau tidak. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut dikemukakan oleh Bapak Benyamin Sina (wawancara, tanggal 19 Oktober 2014) mengatakan:

Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh kepala sekolah, dinas pendidikan, guru, komite sekolah dan masyarakat. Evalusi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Khusus evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dilakukan setiap hari dengan mengawasi pelaksanaan proses belajar mengajar, selain itu pertemuan rutin setiap hari Sabtu merupakan ajang komunikasi guru dan kepala sekolah untuk memecahkan berbagai permasalahan.

Evaluasi yang dilakukan oleh dinas Pendidikan dilakukan oleh pengawas SMA setiap bulan sekali, evaluasi difokuskan pada pelaksanaan program, dan inventarisasi permasalahan yang dihadapi oleh sekolah, sedangkan evaluasi yang dilakukan oleh komite sekolah dan masyarakat terfokus pada penggunaan anggaran khususnya yang bersumber dari masyarakat. Data tentang evalusi dikemukakan oleh Bapak Romanus (wawancara, tanggal 20 Oktober 2014) sebagai berikut:

Berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran, diantaranya baik evaluasi internal maupun eksternal, evaluasi internal dilakukan oleh kepala sekolah dan guru, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh berbagai pihak antara lain dari dinas pendidikan, komite sekolah, dan Badan Pengawasan Daerah(Bawasda), setiap pengawasan mempunyai fokus sendiri-sendiri, misalnya dari Bawasda pengawasan terfokus pada pelaksanaan penggunaan anggaran daerah, sedangkan dari dinas Pendidikan, pengawasan terfokus pada proses pembelajaran.

Berbagai pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut bertujuan untuk menemukan berbagai permasalahan dan mencari solusi apabila terdapat program yang tidak dapat dilaksanakan, dengan kata lain pengawasan dilakukan untuk mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan, baik program kerja, maupun pengelolaan biaya. Hal ini seperti dikemukakan oleh Bapak Marselus Martin (wawancara, tanggal 21 Oktober 2014)sebagai berikut:

Berbagai pengawasan yang dilakukan sebenarnya bertujuan untuk mencari solusi bersama jika terdapat permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan program kerja, selain itu pengawasan yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan, sebagai kepala sekolah saya sangat mendukung dengan adanya pengawasan tersebut, sehingga kami dapat mengetahui kekurangan, kemudian mencari jalan keluarnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru, khususnya terkait dengan pelaksanaan proses belajar mengajar, disambut baik oleh guru, karena guru beranggapan bahwa dengan adanya evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh kepala sekolah secara terus menerus tersebut guru dapat meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik (Hendrika, wawancara tanggal 22 Oktober 2014 ).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa evaluasi kegiatan sekolah dilakukan oleh kepala sekolah, dinas pendidikan, Bawasda, komite sekolah, dan orang tua murid. Pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut bertujuan untuk memberikan solusi bila terdapat permasalahan terkait dengan pelaksanaan program kerja dan mencegah agar tidak terjadi pelanggaran. pelaksanaan evaluasi belajar dalam program perbaikan dan pengayaan kepada siswa, selain disampaikan ke pihak sekolah juga harus disampaikan ke orang tua siswa agar anak tersebut mendapat perhatian orang tua sehingga dapat membantu anak melalui bimbingan di rumah guna memperbaiki prestasi belajar siswa, dengan demikian ada umpan balik antara kepala sekolah, siswa, orang tua dan guru. Kondisi seperti ini menunjukan bhwa keberhasilan proses pendidikan tidak terlepas dari adanya hubungan yang kondusif antara kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua murid.

1. **Manajemen kesiswaan**

Manajemen siswa adalah kegiatan pendataan siswa dari proses penerimaan hingga siswa tersebut keluar sekolah dikarenakan mutasi, tamat atau karena sebab lain.

1. Penerimaan siswa baru

Penerimaan siswa baru merupakan kegiatan penting bagi suatu persekolahan, karena merupakan titik awal penentuan kelancaran tugas sekolah dan proses estafet pendidikan di sekolah dan kesuksesan suatu sekolah.

Penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Talibura dilakukan menjelang tahun ajaran baru dengan melalui seleksi dengan cara tes, baik secara tertulis maupun tes lisan. Untuk tahun ini (tahun ajaran 2014-2015) pendaftaran di buka dengan dua gelombang yaitu :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gelombang | Pendaftaran | Ujian masuk | Pengumuman | Yang diterima |
| 1 Tahap 1 | 2-3 Juli 2014 | 4 Juli 2014 | 4 Juli 2014 | 50 siswa |
| 1 Tahap 2 | 4-5 Juli 2014 | 7 Juli 2014 | 7 Juli 2014 | 50 siswa |
| 2 Tahap 1 | 7-8 Juli 2014 | 9 Juli 2014 | 9 Juli 2014 | 50 siswa |
| 2 Tahap 2 | 9-10 Juli 2014 | 11 Juli 2014 | 11 Juli 2014 | 150 siswa |

Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari informan yaitu bapak FP SMA Negeri 1 Talibura yaitu :

Ya, terkait dengan penerimaan murid baru kepala sekolah melaksanakan kegiatan bersama guru-guru dan para pegawai untuk menerima siswa yang mendaftar di sekolah tersebut, dan apa yang sudah disepakati bersama semuanya harus berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. (Hasil wawancara 9 Oktober 2014)

Jawaban berbeda peneliti memperoleh dari informan guru agama SMA Negeri 1 Talibura (RN) yaitu :

Kepala sekolah mengevaluasi program pendidikan di akhir tahun untuk penerimaan siswa baru bersama guru-guru, sebab dalam penerimaan siswa baru semua guru dan pegawai yang sudah ditugaskan harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan ramah terhadap semua orang yang datang mendaftar d sekolah tersebut. (Hasil wawancara 15 Oktober 2014)

Berdasarkan jawaban informan peneliti dapat simpulkan bahwa kepala sekolah dan guru-guru serta pegawai mengatur siswa baru dalam bentuk individu dan kelompok pada saat masuk sekolah, serta berdasarka tingkat kecerdasannya masing-masing , dan kepala sekolah, guru-guru dan pegawai saling mengharagai antara satu dengan yang lainnya.

b). ketatausahaan siswa

Hasil wawancara (30 September 2014) yang peneliti peroleh dari ibu HA mengatakan bahwa” sebagai tindak lanjut penerimaan siswa baru, maka proses berikutnya menjadi tugas tatausaha sekolah untuk memperoleh pencatatan sekolah”. Dalam pencatatan sekolah di SMA Negeri 1 Talibura dibedakan atas dua jenis catatan untuk seluruh sekolah mencakup :

* Buku induk, meliputi keterangan tentang kesehatan pribadi siswa, latar belakang pendidikan,orang tua kandung/wali, kegemaran, kehadiran, perkembangan bakat, mutasi,akhir pendidikan, dan nilai rapor serta STTB.
* Buku klapper, yaitu buku pelengkap buku induk yang diurutkan menurut abjad dan berfungsi membantu petugas dalam menemukan data dari buku induk.
* Catatan tata tertib sekolah, berisikan peraturan bagaimana sikap dan perilaku siswa di sekolah.

Sedangkan catatan untuk masing-masing kelas meliputi : buku kelas, buku presensi kelas, buku prestasi belajar, bimbingan dan penyuluhan.

c). Pencatatan prestasi belajar siswa.

Hasil wawancara (30 September 2014) yang peneliti peroleh dari ibu SH mengatakan bahwa” pencatatan prestasi belajar siswa di sekolah merupakan pencatatan untuk seluruh sekolah, untuk masing-masing kelas, dan terdapat pula untuk siswa sebagai perseorangan”. Dalam pencatatan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Talibura mencakup :

* Buku daftar nilai, berisikan nilai hasil belajar secara langsung dari kertas pekerjaan (tes), ditangani oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Dari buku ini akan dihasilkan nilai akhir yang selanjutnya akan dimasukan ke dalam buku rapor.
* Buku legger (kumpulan nilai), berisi kumpulan semua nilai untuk semua bidang studi periode(semester).
* Buku rapor, merupakan buku yang memuat laporan hasil belajar siswa selama mengikuti pelajaran di sekolah. Buku ini berfungsi sebagai laporan hasil kerja sekolah kepada orang tua siswa, di samping itu bagi siswa yang dapat memberikan gambaran tentang kemampuan dirinya.
* Mutasi siswa dimaksudkan sebagai perpindahan siswa baik di dalam sekolah (mutasi ekstern). Mutasi intern terjadi apa bila siswa berpindah dari kelas yang satu ke kelas yang lain (naik tingkatan). Sedangkan mutasi ekstern adalah mutasi yang disebabkan karena tamat belajar atau dikeluarkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan ketatausahaan dan pencatatan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Talibura akan mempermudah dan memperlancar pihak sekolah dalam pencatatan, baik dalam buku induk, buku klepper, catatan tatatertib sekolah, buku daftar nilai, buku legger, buku rapor maupun catatan mutasi siswa yang nantinya dapat dipergunakan untuk mengetahuidan mengontrol perkembangan kemajuan prestasi siswa.

1. **Manajemen Tenaga Kependidikan (Personil)**

Istilah personil sekolah dimaksud sebagai semua tenaga yang ada di sekolah, yang dapat mencakup tenagan edukatif dan administratif. Secara operasional, manajemen personil sekolah adalah segenap proses penataan yang bersangkutan dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja di sekolah secara efisien, demi tercapainya visi dan misi sekolah.

Tujuan manajemen personil adalah agar para pegawai yang ada berdaya guna, berhasil guna, tepat guna dan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan.

Ruang lingkup manajemen personil sekolah adalah segenapa proses penataan pegawai yang meliputi semua proses atau cara memperoleh pegawai, pengembangan atau pembinaan, kompensasi, penilaian dan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja.

1. Perencanaan dan pengadaan guru/karyawan.

SMA Negeri 1 Talibura menampung seluruh berkas lamaran dari para pelamar, baik yang di kirim sendiri maupun melalui pos dan akan di seleksi berkas lamarannya.

Hasil wawancara peneliti peroleh dari informan ibu SH SMA Negeri 1 Talibura yaitu :

Menurut saya ya karena selama ini masih kurang guru-guru dan karyawan di sini. Soalnya ada guru-guru dan pegawai di sini selalu pindah sekolah. sedangkan seleksi untuk masuk di sekolah ini yaitu kualifikasi pelamar disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, pemanggilan pelamar yang telah lulus seleksi dan tes seleksi dilaksanakan oleh tim yang di bentuk oleh sekolah sedangkan tes materi seleksinya tes tertulis dan tes wawancara. (Hasil wawancara 30 September 2014)

Jawaban yang berbeda peneliti peroleh dari informan bapak GK SMA Negeri 1 Talibura yaitu :

Ya, pihak sekolah harus merencanakan dan mengadakan rapat supaya pihak sekolah dengan pemerintah serta masyarakat selalu bekerja sama dan tidak ada perselisian dan kesalah pahamaan di antara kami. (Hasil wawancara 5 Oktober 2014)

Selain itu HB selaku guru penjas SMA Negeri 1 Talibura menambahkan sebagai berikut :

Implementasi manajemen personil di SMA Negeri 1 Talibura sudah bagus. Hal ini dilaksanakan dengan terencana dan sistemmatis. Dari data yang di peroleh, dalam hal perencanaan dan pengadaan guru, pihak sekolah dengan teliti mengadakan tahapan seleksi bagi calon guru, hal ini terus dilakukan untuk mengetahui kualifkasi pelamar sesuai kebutuhan sekolah atau belum, mengetahui materi tes atau belum dan yang terpenting adalah untuk menghindarkan dari berkembangnya sifat-sifat nepotisme di lingkungan SMA Negeri 1 Talibura yang dapat mengakibatkan kesenjangan, kecemburuan sosial dan ketidakadilan. (Hasil wawancara 15 Oktober 2014)

Berdasarkan dari jawaban informan peneliti dapat simpulkan bahwa pihak sekolah selalu bekerja sama dan saling menghargai antara sesama teman serta memberi layanan dengan baik bagi pelamar yang datang di sekolah ini, yang terpenting adalah untuk menghindarkan dari berkembangnya sifat-sifat nepotisme di lingkungan SMA Negeri 1 Talibura yang dapat mengakibatkan kesenjangan, kecemburuan sosial dan ketidakadilan.

1. Pembinaan atau pengembangan guru dan karyawan.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan guru di SMA Negeri 1 Talibura, usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk guru-guru dan para pegawai menjadi yang lebih baik dan harmonis.

Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari bapak RN SMA Negeri 1 Talibura yaitu :

Ya kami mengadakan rapat intern sekolah, rapat ini diadakan ketika ada hal-hal yang harus diselesaikan bersama dengan para guru satu sekolahan. Rapat ini bersifat kondisional, Pelatihan komputer, kesenian dan keterampilan, bersama guru-guru SMA Negeri 1 Talibura setiap hari sabtu. Seminar dengan nara sumber berbeda, terkadang nara sumber didatangkan dari dinas pendidikan. (Hasil wawancara 20 oktober 2014)

Selain itu SS selaku guru olah raga SMA Negeri 1 Talibura menambahkan sebagai berikut :

Kegiatan pembinaan guru dan karyawan di SMA Negeri 1 Talibura mutlak dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja guru, memperbaiki dan juga sebagai sarana menambah pengetahuan bagi para guru. Hal ini juga akan bermanfaat bagi sekolah karena nantinya para guru akan melaksanakan tugas secara optimal guna kemajuan sekolah ini. Selain itu untuk kemajuan prestasi di SMA Negeri 1 Talibura dan untuk kelancaran pelaksanaan program sekolah. Pihak sekolah juga membuat peraturan bagi para guru, dan apa bila terdapat guru yang sering kali melanggar peraturan sekolah yang telah ditetapkan, pihak sekolah tidak segan-segan memberhentikannya dari jabatan guru di SMA Negeri 1 Talibura, karena hal ini akan membawa citra buruk sekolah. (Hasil wawancara 30 September 2014)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa hal tersebut sangat efektif dilakukan dalam rangka menunjang kualitas dan perkembangan keilmuan yang harus dimiliki oleh para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas kinerja bagi para karyawan.

1. Pemberhentian pegawai

Hasil wawancara dengan ibu HA mengatakan bahwa “dalam hal pemberhentian pegawai, pihak sekolah tidak segan-segan mengeluarkan ataupun karyawan yang terbukti sering melanggar peraturan yang berlaku di SMA Negeri 1 Talibura, dengan syarat apa bila beberapa kali mendapatkan surat peringatan dari kepala sekolah”. (Hasil wawancara 7 Oktober 2014)

Dalam implementasinya, proses pemberhentian guru dilakukan oleh pihak kepala sekolah berdasarkan peraturan yang berlaku dari pemerintah dan dinas pendidikan.

1. Kompensasi atau balas jasa

Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari bapak AP mengatakan bahwa “Untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang optimal, SMA Negeri 1 Talibura memperhatikan tentang kesejahteraan para pegawai dan guru, karena tanpa memperhatikan kesejahteraan yang cukup tentu para guru pun tidak maksimal dalam mendidik siswa”. Kompensasi yang diberikan oleh pihak sekolah SMA Negeri 1 Talibura kepada para guru antara lain sebagai berikut :

* Tunjangan tutup tahun
* Gaji bulanan
* Gaji pokok
* Tunjangan peningkatan SDM setiap tahun
* Tunjangan kegiatan
* Tunjangan prestasi

Selain itu ibu BN selaku guru kelas SMA Negeri 1 Talibura menambahkan sebagai berikut :

Belum, karena banyak guru yang belum menerima tunjangan dan kesejahteraan dari pihak sekolah, sering terlambat kami menerima gaji serta tidak sesuai yang di harapkan. oleh sebab itu banyak guru yang melalaikan tugasnya sebagai seorang guru dan mengakibatkan terjadinya perselisian diantara kami semua. (Hasil wawancara 9 Oktober 2014)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa mengenai pemberian kompensasi atau balas jasa, hal ini membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Talibura adalah pihak sekolah yang sangat memperhatikan kesejahteraan para guru, karena guru merupakan penentu berjalan atau tidaknya program pembelajaran yang kemudian menentukan prestasi didik dalam rangka meningkatkan SDM di Negara Indonesia. Tetapi ada guru yang lain mengatakan pihak sekolah banyak yang melalaikan tugasnya karena saling irih antara satu dengan yang lainnya dan gaji guru belum semuanya di bayar.

1. Penilaian guru dan karyawan

Secara langsung penilaian guru dan karyawan dilakukan oleh Bapak Marselinus Martin S.Pd selaku kepala sekolah di SMA Negeri 1 Talibura penilaian ini di ambil dari beberapa aspek yakni : kinerjanya, kedisiplinannya dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru dan karyawan dalam usaha peningkatan proses belajar mengajar. Hal ini dapat di lihat dari presensi harian atau daftar hadir, daftar urut kepangkatan, riwayat hidup dan riwayat pekerjaan.

Hasil wawancara peneliti peroleh dari informan yaitu bapak FY SMA Negeri 1 Talibura yaitu :

berbicara tentang masalah kedisiplinan, kepala sekolah memang dikenal sangat disiplin dalam menjalankan tugasnya. Apa yang kepala sekolah lakukan tidak lain untuk menunjukkan sikap keteladanan kepada guru-guru dan pegawai untuk bekerja secara disiplin dan penuh tanggungjawab. Sikap kepala sekolah yang demikian membuat kami merasa malu jika datang dan pulang tidak tepat waktu, walaupun tidak jarang ada guru atau pegawai yang datang terlambat atau pulang lebih awal dari kepala sekolah. Hal ini mungkin juga dipengaruhi oleh tidak adanya penghargaan dari kepala sekolah bagi guru atau pegawai yang disiplin dalam menjalankan tugas serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk kemajuan sekolah. (Hasil wawancara 20 Oktober 2014)

Proses penentuan penilaian bagi para guru dan karyawan di SMA Negeri 1 Talibura adalah tugas kepala sekolah. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk pembinaan para guru terutama bagi guru yang kurang berhasil dalam tugasnya agar mampu bersedia memperbaiki kelemahannya. Selain itu tujuan dari penilaian terhadap guru yaitu sebagai data tentang golongan gaji dan pangkat, sehingga kepala sekolah harus teliti dan objektif dalam memberikan penilaian bagi para guru dan karyawan.

1. **Manajemen keuangan**

Manajemen keuangan adalah segenap kegiatan yang berkenan dengan penataan sumber, penggunaan, pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah.

1. Sumber keuangan

 Sumber-sumber pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 1 Talibura merupakan tanggung jawab pemerintah dan orang tua.

Hasil wawancara peneliti peroleh dari informan ibu ME SMA Negeri 1 Talibura yaitu :

SPP siswa, besarnya @ dan tiap tahun ajaran baru tidak sama. Pembayaran berbeda sesuai dengan kemampuan siswa, tetapi tetap ada batas minimal. Hal ini bertujuan untuk subsidi silang antara siswa mampu dan kurang mampu. Sumbangan siswa berupa dana pembangunan yang jumlahnya di beri batas minimal, sumbangan dari pemerintah daerah yang besarnya tidak pasti, dan sifat kunjungan rutin, dana setia kawan, yaitu infak dari siswa setiap hari kamis yang sifatnya sukarela. (Hasil wawancara 30 September 2014)

Hal senada dikatakan oleh bapk TE SMA Negeri 1 Talibura yaitu :

Bagi siswa yang kurang mampu mendapatkan keringanan berupa beasiswa, penundaan waktu pembayaran, bahkan bagi yang tidak mampu membayar, dapat diambilkan dari dana setia kawan. (Hasil wawancara 7 Oktober 2014)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Pembagian dana tersebut antara lain untuk gaji guru dan karyawan dengan rincian pembyaran sesuai dengan keadaan guru dan karyawan, kemudian pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, pengamanan, sarana dan prasarana sekolah dan lain-lain, penggunaannya sesuai dengan RAPBS (Rencana Anggaran Dan Biaya Sekolah). Implementasi manajemen keuangan di SMA Negeri 1 Talibura berjalan dengan efektif dan transparan.

1. Perencanaan anggaran

Perencanaan anggaran merupakan suatu proses yang penting dan harus mendapatkan perhatian apabila menghendaki suatu tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Tanpa perencanaan anggaran yang matang akan mustahil kegiatan dapat berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai. Dalam perencanaan anggaran harus ditetapkan tujuan yang akan dicapai dan strategi dan pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari informan yaitu bapak KK SMA Negeri 1 Tlibura yaitu :

Dalam perencanaan anggaran di sekolah pihak komite juga mengambil bagian karena dari pihak sekolah sudah mempercayai dan menempatkan komite untuk menyusun dan membuat rencana anggaran yang mau di keluarkan untuk membeli bahan-bahan dan kebutuhan lain yang akan dipergunakan dalam lingkungan sekolah. (Hasil wawancara 20 Oktober 2014)

Hal senada peneliti peroleh dari ibu ER SMA Negeri 1 Talibura yaitu :

Ya, komite sekolah terlibat dalam perencanaan anggaran karena dalam perencanaan anggaran komite sekolah yang ambil bagian untuk menyusun anggaran yang mau di keluarkan dan pemasukannya. Supaya jangan ada yang iri dan saling mencurigai satu sama lain serta kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan lancar. (Hasil wawancara 9 Oktober 2014)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di SMA Negei 1 Talibura merupakan kerjasama antara kepala sekolah, guru-guru, para pegawai dan komite untuk merencanakan anggaran sekolah yang akan di keluarkan maka dari itu kepala sekolah berharap kepada guru-guru dan yang lainnya harus bekerja sama dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya.

1. **Manajemen sarana dan prasarana**

Manajemen sarana dan prasarana merupakan segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan pengadaan, pendayagunaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan, agar tercapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Sarana pendidikan merupakan sarana tersedianya fasilitas penunjang bagi proses belajar mengajar.

Hasil wawancara dengan Bapak RN urusan sarpras SMA Negeri 1 Talibura di ruang guru pada tanggal 02 Okober 2014, memberikan gambaran sebagai berikut:

SMA Negeri 1 Talibura terletak di kompleks talibura di bawah naungan pemerintah, menempati tanah seluas 3000 meter persegi, status tanah hak pakai.

Tabel. 4.5. Sarana dan Prasarana yang dimiliki SMA Negeri 1 Talibura

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Ruang | Jumlah | Kondisi | Keterangan |
| 1 | Ruang kelas | 12 | Baik | - |
| 2 | Ruang laboratorium | 1 | Baik | Alat belum lengkap |
| 3 | Ruang perpustakaan | 1 | baik | Referensi kurang |
| 4 | Ruang lab. komputer | 1 | baik | 23 unit |
| 5 | Ruang keterampilan | 1 | baik | - |
| 6 | Ruang BP | 1 | baik | Ruang kerja umum |
| 7 | Ruang UKS | 1 | baik | Eksklusif |
| 8 | Ruang guru | 1 | baik | Vip |
| 9 | Ruang kepala sekolah | 1 | baik | Vip |
| 10 | Ruang gudang | 1 | baik | Peralatan kantor |
| 11 | Ruang osis | 1 | Baik | Pertemuan siswa |
| 12 | Ruang koperasi siswa | 1 | Baik | Kebutuhan siswa |
| 13 | Ruang TU | 1 | Baik | Ruang operasional |
| 14 | KM/WC guru | 2 | baik | Khusus guru |
| 15 | KM/WC siswa | 9 | baik | Khusus siswa |
| 16 | Aula | 1 | Baik | Tempat pertemuan |

Lebih lanjut bapak RN yang manangani bagian sarana dan prasarana menjelaskan bahwa:

Mengingat sempitnya lahan untuk kegiatan upacara bendera hari senin bergantian dengan SMA Negeri 2 Talibura (2 minggu sekali), minggu ke-2 dan minggu ke-4, untuk upacara peringatan hari besar nasional, pelaksanaan di gabung dengan SMA Negeri 1 Talibura, untuk upacara 17 Agustus bergabung dengan SMK Talibura. Implementasi manajemen sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Talibura berjalan dengan lancar. Hal ini dapat di lihat dari fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah telah memadai. Implementasi manajemen sarana dan prasarana ini dapat berjalan dengan lancar tidak lupa di dukung oleh keuangan sekolah yang lancar, peran serta dan rasa memiliki para guru dan karyawan. Akan tetapi terdapat pula hambatan dalam implementasinya, contohnya ketika pihak sekolah akan mengembangkan sarana yang lebih luas dan lengkap akan terhambat oleh lahannya terlalu sempit dan dekat dengan pemukiman warga.

Hasil wawancara peneliti peroleh dari informan yaitu bapak YB SMA Negeri 1 Talibura yaitu :

Ya, pemerintah memberikan sumbangan ke sekolah berupa buku-buku, komputer, kursi-meja, dan membangun gedung sekolah untuk memperlancarkan kegiatan belajar mengajar serta memberi dukungan terhadap anak didik untuk lebih giat lagi belajar. (Hasil wawancara 2 Oktober 2014)

Hasil wawancara peneliti peroleh dari informan yaitu bapak KK SMA Negeri 1 Talibura yaitu :

Ya, pihak sekolah mengutamakan sarana dan prasarana sebab sarana dan prasarana tidak ada maka di lingkungan sekolah tidak bisa belajar dengan lancar karena tidak ada fasilitas sekolah yang mendukung. (Hasil wawancara 30 September 2014)

Hasil wawancara peneliti peroleh dari informan yaitu ibu HH SMA Negeri 1 Talibura yaitu :

Ya, karena komite sekolah harus bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menggalang dana dari pihak luar supaya bisa membangun sekolah yang lebih baik lagi dan harus saling mempercayai antara satu dengan yang lain supaya fasilitas penunjang pembelajaran berjalan lancar dan bisa digunakan dengan baik, sebab komitelah yang berperan penting dalam lingkungan sekolah untuk mengatur keuangan. (Hasil wawancara 15 Oktober 2014)

Dari berbagai pemaparan informan dapat disimpulkan bahwa tersedianya fasilitas penunjang pembelajaran dapat di perhatikan dengan baik oleh kepala sekolah, komite sekolah dan pemerintah.karena mereka semua bekerja sama dan saling memotifasi antara satu dengan yang lain.oleh kerna itu pihak luar pun mempercayai mereka dan bisa membantu sekolah tersebut untuk memperlancar belajar mengajar di SMA Negeri 1 Talibura.

1. **Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat**

Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan sarana yang sangat bermanfaat dalam rangka memajukan dan mengembangkan sekolah. Sekolah merupakan bagian dari sistem sosial dalam suatu masyarakat yang tidak dapat berjalan sendirian, oleh karena itu antara sekolah dan masyarakat harus ada hubungan baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. (Hasil wawancara dengan Christoforus E. Hon urusan humas SMA Negeri 1 Talibura di ruang guru pada tanggal 02 Oktober 2014). Hubungan sekolah dengan masyarakat di SMA Negeri 1 Talibura meliputi :

1. Kegiatan internal

Kegiatan ini adalah publisitas ke dalam lingkungan sekolah yakni kepala sekolah, para guru, dan karyawan serta seluruh siswa SMA Negeri 1 Talibura.

Kegiatan ini meliputi :

1. Upacara bendera dua minggu sekali.
2. Rapat intern sekolah, rapat ini dihadiri oleh para guru di SMA Negeri 1 Talibura, waktu dan tempatnya bersifat kondisional.
3. Pengumuman sekolah (penggunaan papan pengumuman sekolah). Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang kebijaksanaan dalam penyelenggaraan sekolah dan perkembangan sekolah, menampung saran-saran dari warga sekolah dalam pembinaan dan pengembangan sekolah serta dapat memelihara hubungan yang harmonis dan kerjasama antar warga sekolah.
4. Kegiatan eksternal.

Kegiatan ini hubungan dengan masyarakat di luar warga sekolah.

1. Pengadaan buku penghubung yang ditujukan kepada orang tua siswa dengan dilaporkan satu bulan sekali, hal ini berguna untuk mengetahui perkembangan kemajuan belajar siswa dan peningkatan perbaikan pengajaran.
2. Rapat dan pertemuan pengurus komite sekolah, waktunya kondisional.
3. Rapat bersama pengurus BP. Dari kedua kegiatan tersebut menunjukan bahwa dalam implementasi kegiatan humas di SMA Negeri 1 Talibura harus di dukung dengan program dan perencanaan yang matang, karena dengan demikian akan bermanfaat untuk memajukan dan mengembangkan program sekolah. Implementasi humas di SMA Negeri 1 Talibura sudah efektif dan berjalan dengan lancar, akan tetapi penggunaan media seperti penyebaran informasi belum maksimal walaupun sudah terlaksana.

Hasil waawancara peneliti peroleh dari ibu SS SMA Negeri 1 Talibura yaitu:

Ya, pihak sekolah memiliki hubungan kerja sama dengan masyarakat,tanpa kerja sama dengan masyarakat belajar dan pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik, dan anak didik tidak bisa belajar dengan tenang di sekolah, sebab ada hal-hal yang tidak enak di dengar di luar ruangan seperti rebut-ribut di luar sekolah, banyak anak-anak kecil main di dalam sekolah, dan sebagainya. (Hasil wawancara 6 Oktober 2014)

Hasil wawancara peneliti peroleh dari bapak TT SMA Negeri 1 Talibura yaitu :

Ya, kepala sekolah dan dewan guru mengevaluasi program pendidikan di akhir tahun karena diakhir tahun harus dilaporkan terperinci oleh kepala sekolah kepada guru-guru, komite sekola, orang tua murid dan masyarakat yang berkepentingan di dalam sekolah. Supaya program pembelajaran berjalan dengan lancar dan dipercayai oleh masyarakat luas. (Hasil wawancara 7 Oktober 2014)

Dari berbagai pemaparan informan dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara warga sekolah dan masyarakat menjalin hubungan yang sangat menggairahkan karena saling memberikan motivasi-motivasi yang menguntungkan bagi ke dua belah pihak. Dan untuk mendorong anak didik lebih giat lagi belajar di rumah dan di sekolah serta memberi dukungan terhadap guru-guru untuk lebih giat lagi bekerja dan membimbing anak-anak sekolah untuk menjadi sukses di kemudian hari.

1. **Manajemen layanan khusus.**

Manajemen layanan khusus meliputi : perpustakaan, kesehatan dan keamanan sekolah. Keberadaan perpustakaan sangat penting dalm suatu lembaga pendidikan. Perpustakaan juga menentukan maju mundurnya suatu sekolah. Fungsi utamanya adalah menyimpan, mengumpulkan, memelihara, mengatur dan mendayagunakan bahan perpustakaan untuk keperluan pendidikan dan pengajaran. Hal ini akan memudahkan siswa dan guru untuk mendapatkan referensi khususnya sastra dan mata pelajaran terkait.

Hasil wawancara peneliti peroleh dari informan yaitu guru bahasa Indonesia pengelolah perpustakaan SMA Negeri 1 Talibura yaitu :

Tidak dari pihak sekolah dengan staff dan personel sekolah melayani keperluan siswa bersama-sama dan tidak membedahkan siswanya. Perpustakaan di SMA Negeri 1 Talibura menyediakan koleksi bahan pustaka dan relefan dengan program studi yang ada. Bahan pustaka yang tersedia antara lain : buku pelajaran, ensiklopedia, kamus inggris, kamus jerman, dan kamus Indonesia serta tokoh-tokoh dan sebagainya. (Hasil wawancara 30 September 2014)

Selain itu bapak KK selaku pengurus perpustakaan SMA Negeri 1 Talibura menambahkan sebagai berikut :

Sumber bahan pustakaan untuk pengadaannya di peroleh dari pemerintah dan dinas pendidikan. Sistem peminjaman buku untuk di bawah pulang siswa harus memiliki kartu anggota dengan lama pinjaman 1 hari untuk fiksi dan 1 semester untuk buku pelajaran. Sebelum pustaka dipinjamkan kepada siswa atau guru, buku harus di olah terlebih dahulu yang pengelolaannya meliputi : Pencatatan ke dalam buku induk, Pemberian stempel inventaris dan stempel perpustakaan, Pembuatan kartu buku, Pmberian catalog buku dan slip tanggal, Pemberian nomor inventaris, Pemberian nomor buku atau nomor punggung dan Pembuatan kartu catalog. (Hasil wawancara 9 Oktober 2014)

Hasil wawancara peneliti peroleh dari guru bidang studi matematika SMA Negeri 1 Talibura yaitu :

Implementasi pengelolaan perpustakaan di SMA Negeri 1 Talibura berjalan dengan lancar dan efektif. Hal ini dapat di lihat dari penyediaan koleksi bahan pustaka beserta pendukungnya yang relevan dengan program studi yang ada di sekolah. Di samping itu sistem peminjaman yang terdapat di perpustakaan SMA Negeri 1 Talibura terealisasi dengan baik.

Manajemen layanan khusus lainnya adalah layanan kesehatan dan keamanan. Sekolah sebagai satuan pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan proses pembelajaran, tidak hanya bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap saja, tetapi harus menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani peserta didik. Di samping itu, sekolah juga perlu memberikan pelayanan keamanan kepada peserta didik dan para guru yang ada di sekolah agar mereka dapat belajar dan melaksanakan tugas dengan tenang dan aman.

 Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam perencanaan merupakan suatu proses yang penting dan harus mendapatkan perhatian apabila menghendaki suatu tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Tanpa manjemen berbasis sekolah dalam perencanaan yang matang akan mustahil kegiatan dapat berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai. Manajemen berbasis sekolah dalam perencanaannya harus ditetapkan tujuan yang akan dicapai dan strategi dan pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

SMA Negeri 1 Talibura Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur sebagai SMA rintisan MBS secara aktif menyusun program sekolah secara bersama-sama antara Kepala Sekolah, guru dan komite sekolah serta tokoh masyarakat. Implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Talibura Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur dilaksanakan melalui tiga tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. **Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan pada bagian sebelunnya, maka secara deskriptif dari hasil penelitian ini, terungkap bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Talibura Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur mengandung beberapa komponen yang perlu dimiliki antara lain : manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan, manajemen tenaga kependidikan, manajemen sarpras, manajemen humas dan manjemen layanan khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa:

1. **Manajemen kurikulum.**

Dengan demikian, pengembangan kurikulum meliputi penyusunan dokumen, implementasi dokumen serta evaluasi dokumen yang telah disusun (Wina Sanjaya, 2008). Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa: “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa pelaksanaan manajemen kurikulum adalah suatu komponen yang tidak pernah hilang dalam perencanaan program pembelajaran, dimana manajemen kurikulum tersebut merupakan proses yang didalamnya mengupayakan perbaikan proses pengajaran melalui kurikulum yang diterapkan dalam perencanaan program pembelajaran, karena dalam hal ini diciptakan oleh seorang guru yang memegang peranan penting dalam menstimulasi dan mempertahankan keterlibatan siswa dalam belajar. Berdasarkan temuan dilapangan pada SMA Negeri 1 Talibura telah berupaya untuk menciptakan perencanaan program pembelajaran yang efektif dan efisien dalam manajemen kurikulum berdasarkan hasil kerja sama semua guru-guru dan pegawai-pegawai sekolah serta di lihat dari visi dan misi sekolah yang dipaparkan oleh kepala sekolah. Dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan individual peserta didik untuk memiliki tingkat penguasaan di atas standar yang telah ditentukan (dalam sikap, ketrampilan dan pengetahuan) dan disediakan sesuai dengan minat dan kemampuan awal peserta didik serta kelengkapan untuk kepentingan kami sebagai guru dalam mengajar.

Manajemen kurikulum yang penyusunan kelender pendidikannya berdasarkan temuan dilapangan menyangkut proses pemembelajaran bagi peserta didik, maka guru-guru yang mengutamakan kepentingan siswa dalam belajar harus mampu mendorong suasana belajar yang kreatif dan menyenangkan serta mengikuti tatatertib yang sudah di buat oleh pihak sekolah karena selama ini masi ada guru-guru yang melalaikan tugas sebagai guru.

Dalam manajemen kurikulum tingkat penetapan pelaksanaan evaluasi belajar berdasarkan temuan dilapangan ada 14 responden menjawab ya, bahwa mereka telah melaksanakan evaluasi baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan, tetapi hampir semua responden (12 guru) menjawab mereka melaksanakan evaluasi secara tertulis atau sekitar 85,71 persen sedangkan 2 orang atau sebesar 14,29 persen menjawab evaluasi yang dilakukan dengan cara lisan. Mereka berpendapat bahwa anak-anak menjadi lebih fokkus megikuti ulangan atau ujian dan tidak punya kesempatan untuk menyontek. Dalam evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran, diantaranya baik evaluasi internal maupun eksternal, evaluasi internal dilakukan oleh kepala sekolah dan guru,sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh berbagai pihak antara lain dari dinas pendidikan, komite sekolah, dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda), setiap pengawasan mempunyai fokus sendiri-sendiri, misalnya dari Bawasda pengawasan terfokus pada pelaksanaan penggunaan anggaran daerah, sedangkan dari dinas Pendidikan, pengawasan terfokus pada proses pembelajaran.

1. **Manajemen kesiswaan.**

Mulyasa (2003: 45) manajemen kesiswaan atau manejemen kemuridan (peserta didik) merupakan salah satu bidang operasional MBS. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah.

Berdasarkan temuan dilapangan kegiatan mengajar dapat mengupayakan terciptanya situasi yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar mengajar dan diartikan pula sebagai penyajian konsep, untuk itu memerlukan prinsip-prinsip di mulai dari membangkitkan perhatian siswa, menimbulkan aktivitas, sampai pada mengevaluasi sebagai motivasi siswa untuk lebih giat dalam belajar. Penerimaan siswa baru merupakan kegiatan penting bagi suatu persekolahan, karena merupakan titik awal penentuan kelancaran tugas sekolah dan proses estafet pendidikan di sekolah dan kesuksesan suatu sekolah. Penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Talibura dilakukan menjelang tahun ajaran baru dengan melalui seleksi dengan cara tes, baik secara tertulis maupun tes lisan.

1. **Manajemen keuangan.**

Dalam penyelenggaraan pendidikan, manajemen keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. komponen-komponen manajemen keuangan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen yang lain. Dalam rangka implementasi MBS, manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik, dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pegawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran serta bebas dari penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam Manajemen keuangan adalah segenap kegiatan yang berkenan dengan penataan sumber kuangan, penggunaan, pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah. Berdasarkan temuan dilapangan sumber-sumber pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 1 Talibura merupakan tanggung jawab pemerintah dan orang tua murid serta Sumbangan siswa berupa dana pembangunan yang jumlahnya di beri batas minimal, sumbangan dari pemerintah daerah yang besarnya tidak pasti, dan sifat kunjungan rutin, dana setia kawan, yaitu infak dari siswa setiap hari kamis yang sifatnya sukarela.

Dalam manajemen keuangan perencanaan anggaran merupakan suatu proses yang penting dan harus mendapatkan perhatian apabila menghendaki suatu tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Tanpa perencanaan anggaran yang matang akan mustahil kegiatan dapat berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai. Berdasarkan temuan dilapangan guru-guru dan komite menyusun dan membuat rencana anggaran yang mau di keluarkan untuk membeli bahan-bahan dan kebutuhan lain yang akan dipergunakan dalam lingkungan sekolah.

1. **Manajemen tenaga kependidikan.**

Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang harus dilaksanakan pimpinan, adalah menarik, mengembangkan, menggaji, dan memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karier tenaga kependidikan, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi.

Manajemen tenaga kependidikan dalam perencanaan dan pengadaan pegawai berdasarkan temuan dilapangan dari data yang di peroleh, dalam hal perencanaan dan pengadaan guru, pihak sekolah dengan teliti mengadakan tahapan seleksi bagi calon guru, hal ini terus dilakukan untuk mengetahui kualifkasi pelamar sesuai kebutuhan sekolah atau belum, mengetahui materi tes atau belum dan yang terpenting adalah untuk menghindarkan dari berkembangnya sifat-sifat nepotisme di lingkungan SMA Negeri 1 Talibura yang dapat mengakibatkan kesenjangan, kecemburuan sosial dan ketidakadilan.

Manajemen tenaga kependidikan dalam rangka pembinaan dan pengembangan guru di SMA Negeri 1 Talibura, usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk guru-guru dan para pegawai menjadi yang lebih baik dan harmonis, berdasarkan temuan dilapangan guru-guru mengadakan rapat intern sekolah, rapat ini diadakan ketika ada hal-hal yang harus diselesaikan bersama dengan para guru satu sekolahan. Serta mutlak dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja guru, memperbaiki dan juga sebagai sarana menambah pengetahuan bagi para guru. Hal ini juga akan bermanfaat bagi sekolah karena nantinya para guru akan melaksanakan tugas secara optimal guna kemajuan sekolah ini.

Manajemen tenaga kependidikan dalam hal pemberhentian pegawai berdasarkan temuan dilapangan pihak sekolah tidak segan-segan mengeluarkan ataupun karyawan yang terbukti sering melanggar peraturan yang berlaku di SMA Negeri 1 Talibura, dengan syarat apa bila beberapa kali mendapatkan surat peringatan dari kepala sekolah

Dalam manajemen tenaga kependidikan kompensasi atau balas jasa berdasarkan temuan dilapangan untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang optimal, SMA Negeri 1 Talibura memperhatikan tentang kesejahteraan para pegawai dan guru, karena tanpa memperhatikan kesejahteraan yang cukup tentu para guru pun tidak maksimal dalam mendidik siswa. Kompensasi yang diberikan oleh pihak sekolah SMA Negeri 1 Talibura kepada para guru antara lain yaitu : Tunjangan tutup tahun, Gaji bulanan, Gaji pokok, Tunjangan peningkatan SDM setiap tahun, Tunjangan kegiatan dan Tunjangan prestasi. Dalam manajemen tenaga kependidikan Secara langsung penilaian guru dan karyawan berdasarkan temuan dilapangan penilaian ini di ambil dari beberapa aspek yakni : kinerjanya, kedisiplinannya dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru dan karyawan dalam usaha peningkatan proses belajar mengajar.

1. **Manajemen sarpras.**

Mulyasa (2003: 49) sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran.

Sarana dan prasarana pendidikan adalah faktor penunjang yang memiliki pengaruh yang cukup besar demi efektifitas sesuatu proses pembelajaran. Dimana sarana dan prasarana yang tidak memadai dalam suatu ruang lingkup pendidikan dapat mengakibatkan proses pendidikan mengalami ketertinggalan. Pendidikan di jaman sekarang ini tentunya perlu di tunjang dengan sarana dan prasarana yang tergolong dapat mengikuti jaman. Oleh karena itu sangatlah penting peranan manajemen sarana dan prasarana dalam suatu lingkup pendidikan.

Dalam manajemen sarana dan prasarana tersedianya fasilitas penunjang pembelajaran berdasarkan temuan dilapangan mengingat sempitnya lahan untuk kegiatan upacara bendera hari senin bergantian dengan SMA Negeri 2 Talibura (2 minggu sekali), minggu ke-2 dan minggu ke-4, untuk upacara peringatan hari besar nasional, pelaksanaan di gabung dengan SMA Negeri 1 Talibura, untuk upacara 17 Agustus bergabung dengan SMK Talibura. Implementasi manajemen sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Talibura berjalan dengan lancar. Hal ini dapat di lihat dari fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah telah memadai. Implementasi manajemen sarana dan prasarana ini dapat berjalan dengan lancar tidak lupa di dukung oleh keuangan sekolah yang lancar, peran serta dan rasa memiliki para guru dan karyawan. Akan tetapi terdapat pula hambatan dalam implementasinya, contohnya ketika pihak sekolah akan mengembangkan sarana yang lebih luas dan lengkap akan terhambat oleh lahannya terlalu sempit dan dekat dengan pemukiman warga.

1. **Manajemen humas.**

Masyarakat merupakan partner sekolah dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran. Hubungan sekolah dengan masyarakat sebenarnya sudah didesentralisasikan tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk (1) meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak. (2) memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Dan (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.

Dalam manajemen hubungan sekolah dan masyarakat secara langsung menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah berdasarkan temuan dilapangan pihak sekolah memiliki hubungan kerja sama dengan masyarakat, tanpa kerja sama dengan masyarakat belajar dan pembelajaran di sekolah tidak bisa berjalan dengan baik, dan anak didik tidak bisa belajar dengan tenang di sekolah, sebab ada hal-hal yang tidak enak di dengar di luar ruangan seperti rebut-ribut di luar sekolah, banyak anak-anak kecil main di dalam sekolah, dan sebagainya.

Hubungan sekolah dengan dunia luar tentunya perlu untuk di jaga. Dimana stakeholders pendidikan sebagai pihak yang juga punya peranan terhadap proses pendidikan yang berlangsung baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat dalam hal ini orang tua siswa sangat perlu memahami akan pentingnya pendidikan.

1. **Manajemen layanan khusus.**

Manajemen layanan khusus perpustakaan sekolah berdasarkan temuan dilapangan sebagai sarana pendidikan yang sangat penting harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. Terlebih bila kita lihat perkembagan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini demikian pesatnya, maka peranan buku sebagai sumber informasi sangat kuat dan mutlak diperlukan di sekolah. Agar penggunaan perpustakaan sekolah dapat berjalan tertib, efektif dan efisien diperlukan berbagai kelengkapan tata laksana, anatara lain : tata tertib perpustakaan, buku induk anggota perpustakaan, buku induk bahan pustaka, almari catalog, kartu buku, kantong buku, lembar pengambilan, kartu peminjam, label buku, blangko peringatan, dan kartu catalog.

Manajemen layanan khusus lainnya adalah layanan kesehatan dan keamanan. Berdasarkan temuan dilapangan sekolah sebagai satuan pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan proses pembelajaran, tidak hanya bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap saja, tetapi harus menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani peserta didik. Di samping itu, sekolah juga perlu memberikan pelayanan keamanan kepada peserta didik dan para guru yang ada di sekolah agar mereka dapat belajar dan melaksanakan tugas dengan tenang dan aman.

Berdasarkan hasil peneltian tentang komponen-komponen MBS di SMA Negeri 1 Talibura , secara keseluruhan belum optimal dan kurang sesuai dengan konsep ideal dengan prinsip sebagai pelayanan pengembangan profesionalitas guru dalam menjalankan tugasnya. Menurut penulis, untuk mengatasi masalah tersebut di atas kepala sekolah sebagai supervisor harus betul-betul memaksimalkan pelaksanaan MBS yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab bukan karena adanya kewajiban atau tuntutan dari pengwas pendidikan akan tetapi dengan penuh kesadaran bahwa melalui pelaksanaan supervisi, proses pembelajran di kelas dapat berjalan dengan efektif dan terlebih lagi untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **KESIMPULAN**

Setelah peulis mengkaji dan mengadakan analisa tentang implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Talibura, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah yang kondusif pada SMA Negeri 1 Talibura belum berjalan sesuai dengan ketentuan dan belum optimal. Hal ini disebabkan karena manajemen kurikulum, manajemen keuangan, manajemen tenaga kependidikan, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, manajemen sarana dan prasarana, manajemen kesiswaan dan manajemen layanan khusus belum di kelola secara profesional.

**B. SARAN**

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang di peroleh, maka penulis dapat menyarankan hala-hal sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Daerah Khususnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur, agar lebih meningkatkan pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah dengan baik melalui pelatihan serta memberi dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai.

85

1. Kepada Kepala Sekolah sebaiknya lebih memperhatikan dan selalu memberikan motivasi kepada guru-guru terutama dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam implementasi manajemen berbasis sekolah yang kondusif dalam proses pembelajaran.
2. Hendaknya guru melaksanakan MBS dengan baik, dalam hal manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan, manajemen tenaga kependidikan, manjemen sarpras, manajemen humas dan manajemen layanan khusus agar pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan tujuan pembelajaran.

 **DAFTAR PUSTAKA**

Abustam, Idrus, Djaali dan Rahman Asfah, M. 1996. *Pedoman Praktis Penelitian dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Ujung Pandang Lembaga Penelitian IKIP Ujung Pandang

Arikunto, Suharsimi, 2002 *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek,* Rineka Cipta, Cet ke-12 : Jakarta

Bastian, Reza Aulia. 2002. *Reformasi Pendidikan.* Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama. Berkepanjangan, ICW,2004

Candoli, 2002. *Konsep & pelaksanaan*, Jakarta : Dirjen Dikdasmen

Dunn,William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta. Gajah Mada University Press

Engkoswara. 1988. *Manajemen Berbasis Sekolah . Bandung : PT Remaja Rosdakrya*

Fatah, Nanang,s 2003 *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*, Bandung Pustaka Bani Quraisy

Hasan Hamid, 1988. Kurikulum Yang Disempurnakan, Pengembangan Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar, Bandung : PT. Remaja Rosddakarya.

Mulyana. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy. J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mantja, W. 1990. *Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pengajaran*, malang: Wineka Media

Mantja, W. dan Imron. AH. 1998. *Manajemen Peserta Didik*. Malang, Depdikbud

Mardalis, 1993, *Metode PenelitianSuatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara

Margono, S. 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Jakarta Rineka Cipta

Mohrman Susan Albert and Wholstette Priccilla (1994). *School-Based Management, Organizing for High Performance, San Fransisco*: Josse-Bass Publisher

Mulyasa, E. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi dan Implementasi)* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

--------------, 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah (konsep, strategi, implementasi)* cetakan ke – 10, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

--------------. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi, dan Implementasi.* Cetakan ke-11 Bandung: Rosdakarya.

----------------, 2011.*Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi dan Implementasi)* cetakan ketigabelas, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Nugroho, D. Riant. 2000. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta : PT Elex Media Computindo

Nawawi, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung : Remaja Rosdakarya

Ogawa dan Kranz, 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi, dan Implementasi.* Cetakan ke-11 Bandung: Rosdakarya.

Rutmini dan Juyono. 1999. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konseptual dan Kemungkinan Strategi Pelaksanaan*. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembanagan Depdiknas

Rahardja, 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah,* Teori dan Praktek Bandung : Rosda

Sudjanto Bedjo, 2005. Manajemen Pendidikan Bebasis Sekolah Model Pengelolaan Sekolah Di Era Otonomi Daerah, Jakarta : CV. Sagung Seto.

Suparno, Paul. SJ. 2002. *Reformasi Pendidikan (Sebuah Rekomendasi).* Yogyakarta: Kanisius

sugiyono*, 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung : Remaja Rosdakarya

Slameto 2002. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Dinas Pendidika

Slamet, 2002. *Manajemen Pendidikan Bebasis Sekolah Model Pengelolaan Sekolah* Di Era Otonomi Daerah, Jakarta : CV. Sagung Seto.

Sutrisno Hadi, 1993 *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta Sinar Grafika